

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP
PT. TELKOM KANCATEL LUMAJANG**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.M.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER



Unit Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

Amreta Andhana Warih

NIM : 000903101105

Dosen Pembimbing :

Drs. AGUS BUDIHARDJO, MA
NIP. 130 879 634

Asal : Hadiah
Terima : Tgl. 30 DEC 2003
No. 1

Pembelian

PAJAK PENGHASILAN

Klass

336.24

WAR

P4

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2003

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : AMRETA ANDHANA WARIH
NIM : 000903101105
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PT.
TELKOM KANCATEL LUMAJANG .

Jember, 7 Juli 2003
Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. AGUS BUDIARDJO
NIP : 130 879 634

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

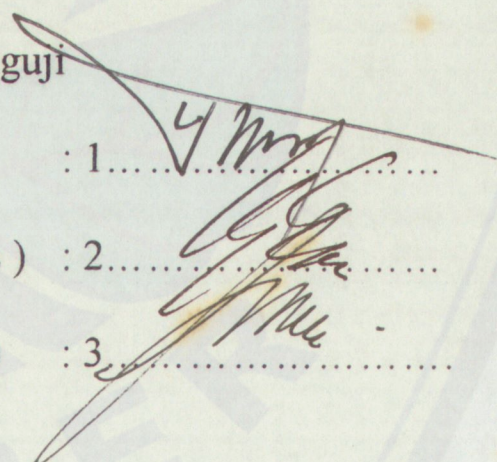
Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Nama : AMRETA ANDHANA WARIH
NIM : 000903101105
Jurusan : Ilmu Adminstrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
PEGAWAI TETAP PT. TELKOM KANCATEL LUMAJANG**

Hari : SENIN
Tanggal : 21 JULI 2003
Jam : 15.00
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

- | | | |
|---|-------------------------|---|
| 1. Drs. H. HUMAIDI, SU
NIP. 130 261 662 | (Ketua) : 1..... |  |
| 2. Drs. AGUS BUDIHARDJO, MA
NIP. 130 879 634 | (Sekretaris) : 2..... | |
| 3. Drs. SUDARMAN
NIP. 010 036 017 | (Anggota) : 3..... | |

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim.....

Assalamualaikum. Wr. Wb

Dengan memanjatkan segala puji rasa syukur atas kehadiran Allah. SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis. Hanya dengan kuasa-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada PT. Telkom Kancatel Lumajang. PT. Telkom Kancatel Lumajang tersebut beralamatkan di Jalan PB. Sudirman 20 Lumajang.

Adapun penulisan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini juga merupakan persyaratan untuk meraih gelar A. Md Perpajakan (Ahli Madya Perpajakan). Dalam penyusunan Laporan ini didasarkan pada hasil PKN (Praktek Kerja Nyata) disertai dengan teori-teori yang ada pada buku literatur yang terkait dengan obyek yang dipilih oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini penulis telah melibatkan banyak pihak, Untuk itu penulis ingin menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya serta permohonan maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang diperbuat secara disengaja maupun tidak disengaja, terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Ardiyanto, M.Si. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Drs. Agus Budihardjo, MA, selaku Dosen Pembimbing.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Bapak Amir Yunus, selaku Manager PT. Telkom Kancatel Lumajang.
7. Bapak Tri Cahyono, selaku Senior Supervisor Support.

8. Bapak Sunarto, Pak Yoko, Pak Pardi, Pak Hari, Bu Wi, Bu Wahyuni, terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN).
9. Segenap Karyawan PT. Telkom Kancatel Lumajang.
10. Teman-temanku Dwi, Yuli thanks atas semuanya.
11. Seluruh teman-temanku D III Perpajakan angkatan 2000.
12. Ibu Nilam, Pak Kadi, Dadan, Mas Deni, Vian, Mbah'e (seluruh keluargaku) thanks ya.....

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan ini, masih banyak terdapat kekurangan/kesalahan dan jauh dari sempurna, karena itu penulis selalu berlapang dada dalam menerima saran-saran serta kritik yang membangun. Semoga hasil Laporan ini memberikan manfaat bagi yang memerlukan. Khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa D III Perpajakan, bagi penulis dan bagi kita semua, Amien.

Wasalamuallaikum. Wr. Wb.

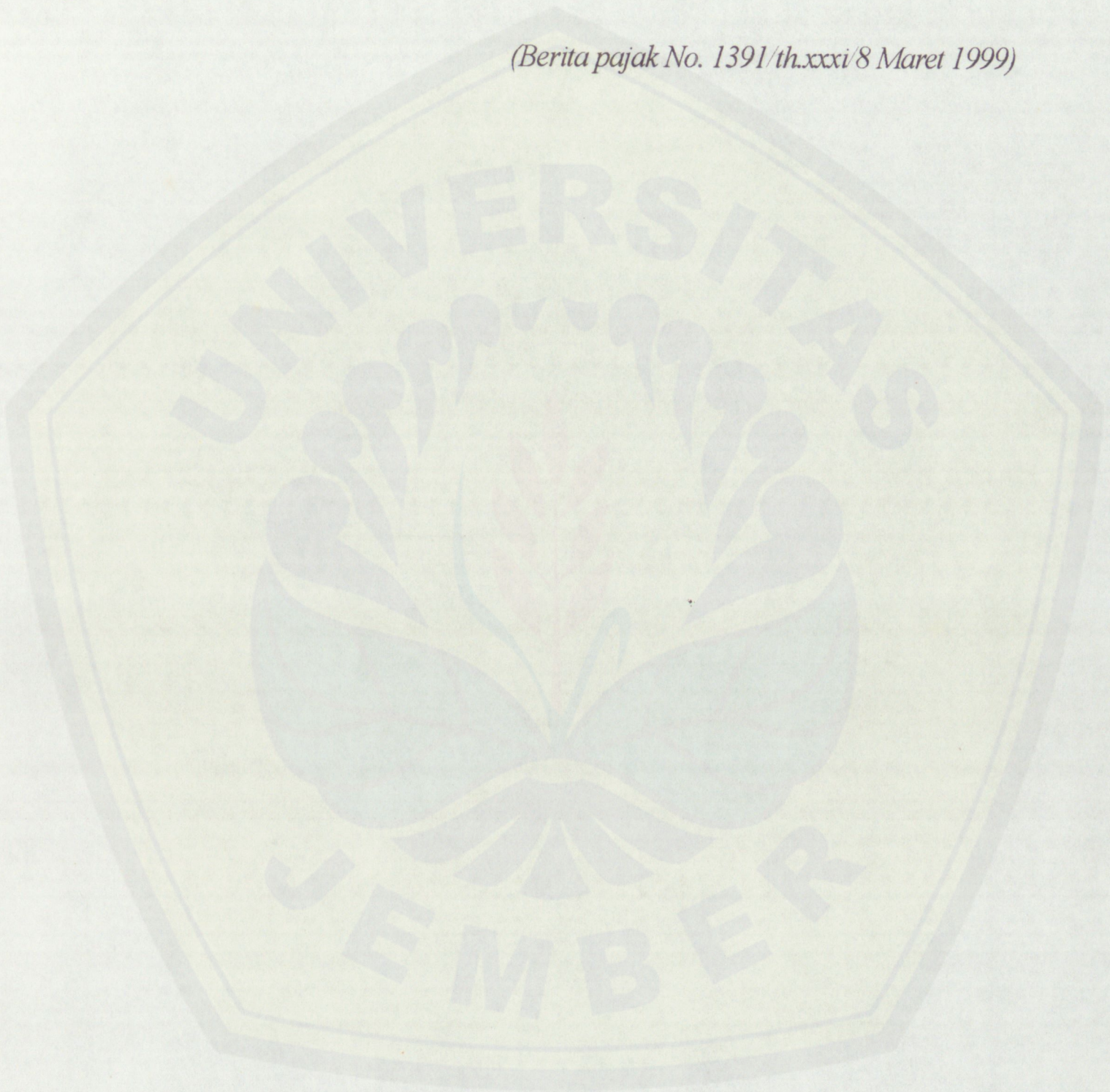
Jember, 14 April 2003

Penulis

MOTTO

Bayarlah pajak sejak dini agar anak cucu kelak tidak menuduh kita telah hidup tak berguna

(Berita pajak No. 1391/th.xxxi/8 Maret 1999)



PERSEMBAHAN

Laporan ini Ku persembahkan untuk :

Allah.SWT, yang selalu melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya.

Nabi besar *Muhammad. SAW*, yang memberi contoh yang baik bagi umat Islam.

Orang Tuaku “ *Bapak Mariman Rio Widodo,S.H* ” dan “ *Ibu Wahyu Hersiwi* ” tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, perhatian tiada habisnya dan Do’a yang terus mengalir. Terima kasih *Amreta* ucapkan.

Suamiku “ *Yusdi Umara* ” tercinta, yang selalu sabar, menerima aku apa adanya, mencintaiku dengan segenap jiwa raganya. Thank’s atas perhatianmu.

Anak’ku tersayang “ *Arsyl* ”. Senyum’mu adalah semangat buat’ku.

Adek’ku tersayang “ *Okta* ” dan “ *Nova* ”, yang selalu menemaniku, semoga cinta kalian tak pernah luntur buat’ku.

Almamaterku tercinta

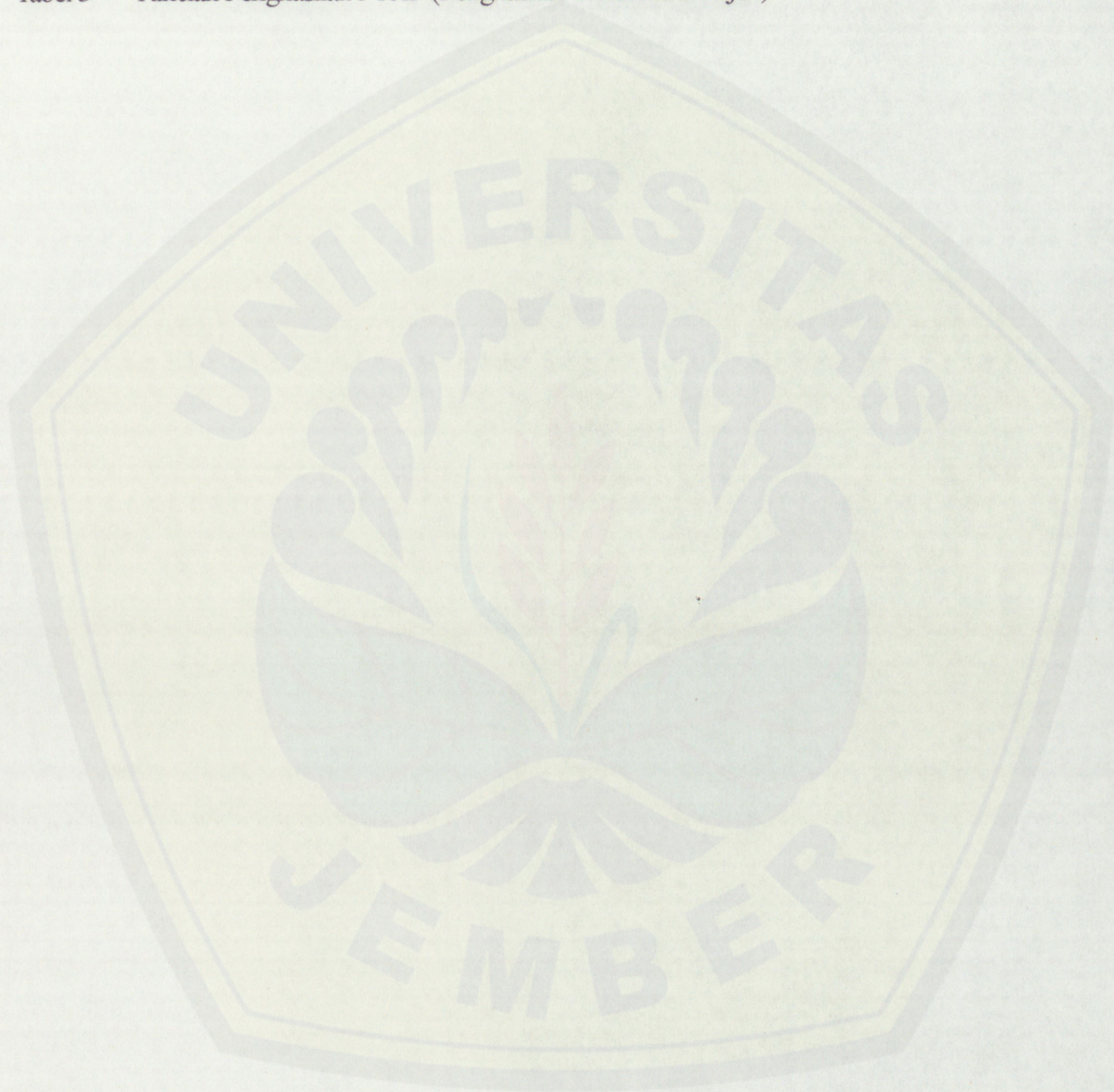
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	3
1.3 Jangka Waktu dan Obyek Praktek Kerja Nyata (PKN)	3
1.3.1 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata (PKN)	3
1.3.2 Obyek Praktek Kerja Nyata (PKN)	4
II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	5
2.1 Sejarah Telekomunikasi PT. Telkom	5
2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	12
2.2.1 Struktur Organisasi	13
2.2.2 Uraian Tugas	14
2.3 Visi dan Misi PT. Telkom	21
2.4 Etos Kerja <u>4@S</u> PT. Telkom Divisi Regional V Jawa Timur	22
2.5 Kebijakan Mutu PT. Telkom Divisi Regional V Jawa Timur	22

2.6 Kebijakan 3 – 5 – 2 PT. Telkom Indonesia, tbk	23
2.7 Kegiatan Usaha PT. Telkom Indonesia, tbk	23
2.8 Penggajian Karyawan PT. Telkom Kancatel Lumajang	27
III PELAKSANAAN PKN (PRAKTEK KERJA NYATA)	29
3.1 Diskripsi Pelaksanaan PKN (Praktek Kerja Nyata)	29
3.2 Hasil PKN (Praktek Kerja Nyata)	31
3.3 Penilaian Terhadap Perusahaan PT. Telkom Kancatel Lumajang Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan	38
IV KESIMPULAN DAN SARAN	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	41

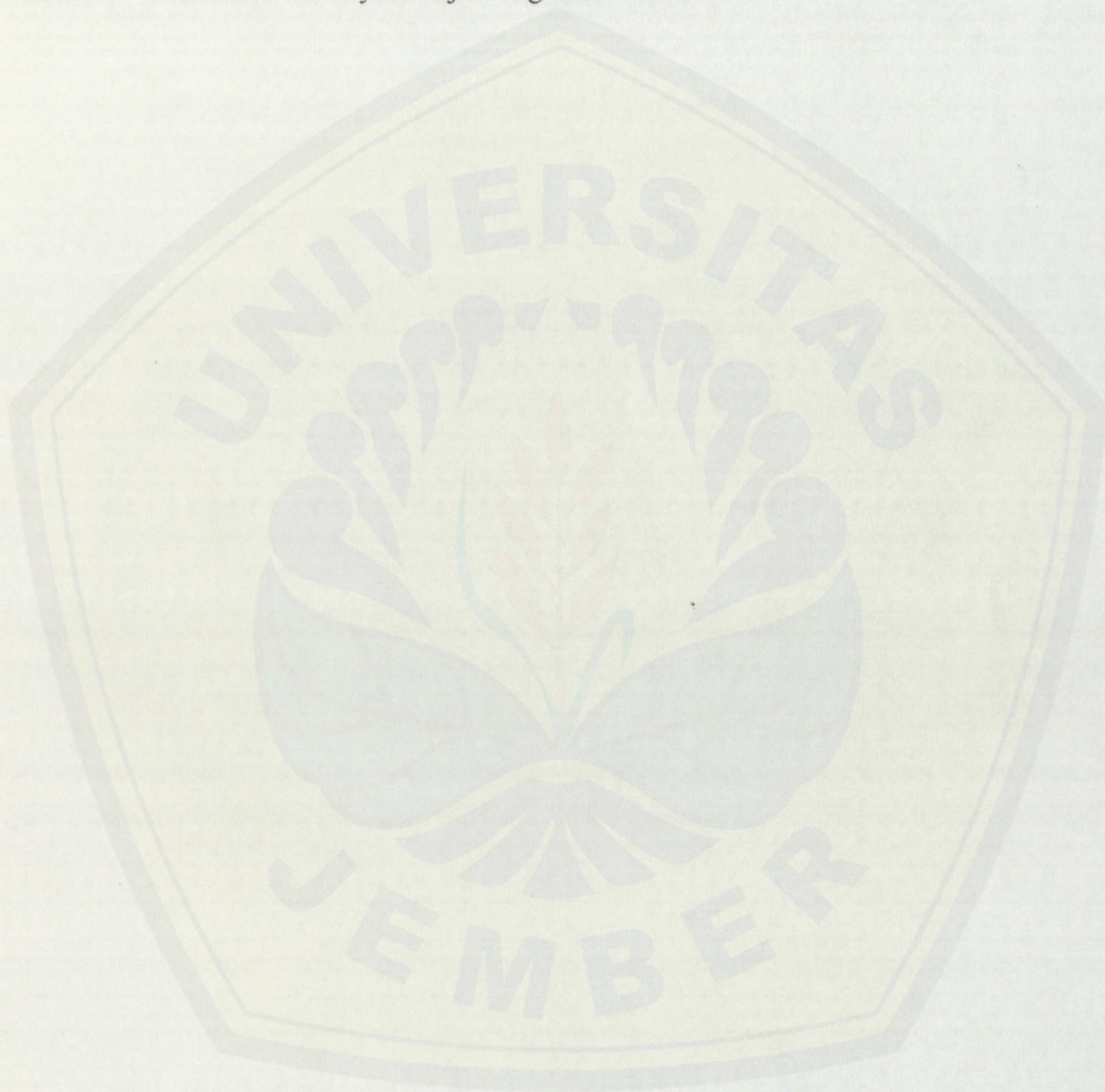
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jam Kerja PT. Telkom Kancatel Lumajang.	30
Tabel 2 Daftar Kegiatan PKN (Praktek Kerja Nyata)	30
Tabel 3 Rincian Penghasilan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)	33



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi	12
Gambar 2 Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	36



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Era Globalisasi yang kini tengah melanda seluruh penjuru dunia, sangat mempengaruhi dan mengubah sistem tatanan dan regulasi yang ada. Khususnya bagi negara Indonesia yang merupakan negara berkembang. PT.Telkom merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi. Kehadiran dan peranan telekomunikasi di tengah masyarakat sudah menjadi suatu keharusan dan telah merasuk ke berbagai bidang kehidupan. Ini berarti hampir tidak ada kegiatan yang tidak memanfaatkan telekomunikasi sebagai sarannya. Dipihak lain, menjelang datangnya pasar bebas yang dicirikan oleh hilangnya batas-batas negara (*borderless states*), sangat mudahnya segala informasi dan berbagai komoditi ke luar masuk ke dalam dari berbagai negara – akibat globalisasi – sebenarnya merupakan persoalan tersendiri yang harus dihadapi dunia telekomunikasi Indonesia. Ini berarti bahwa pemerintah Indonesia harus cermat menghitung berbagai kemungkinan serta menyusun serangkaian strategi dan mengantisipasi perkembangan negara di era pasar bebas nanti.

Pembangunan Nasional mengubah pada Industri yang berteknologi modern. Dalam Hal ini penerimaan negara mengendalikan penerimaan dari berbagai sektor. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh perorangan atau badan selama satu tahun. Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia memiliki dasar hukum yang sangat kuat yang diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat 2 UUD'45 “Segala Pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”. Untuk itu sistem perpajakan yang lama ternyata tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia dari berbagai segi.

Oleh karena itu pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu UU No 10 tahun 1994. Sebagai ganti dari UU No 7 tahun 1983 dan UU No



7 tahun 1991 yang dianggap kurang mampu menampung amanat dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sehingga dilakukannya perubahan sistem perpajakan yang baru itu dengan maksud untuk mencapai kesempurnaan.

Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Maka dari itu PT.Telkom wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu PT.Telkom juga wajib memungut pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan karyawan. PT.Telkom berhak menggunakan Sistem Self Assesment yaitu Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memotong, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam Sistem Self Assesment tersebut bahwa tiap Wajib Pajak mempunyai kewajiban antara lain :

- a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah mana Wajib Pajak berkedudukan atau bertempat tinggal (kecuali bagi Wajib Pajak tertentu) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Menghitung sendiri pajak yang terutang dan membayar pajak dalam tahun pajak berjalan baik dengan menyetor sendiri maupun melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain.
- c. Menyampaikan SPT Tahunan mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dalam (1) satu tahun pajak, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis membuat laporan hasil Praktek Kerja Nyata dengan judul **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT.Telkom Kancatel Lumajang”**. Praktek Kerja Nyata (PKN) tersebut dilakukan pada PT. Telkom Kancatel Lumajang. Dalam waktu kurang lebih satu bulan yaitu mulai tanggal 5 Maret 2003 sampai dengan tanggal 28 Maret 2003.

1.2 Alasan Pemilihan Judul

Adapun dalam penulisan judul terdapat beberapa alasan antara lain yaitu:

- 1.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu penerimaan pajak yang potensial bagi negara.
- 1.2.2 PT.Telkom Kancatel Lumajang hanya memberikan 2(dua) pilihan pembahasan pajak yaitu tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT. Telkom Kancatel Lumajang.
- b. Untuk memperoleh uji pengalaman praktis tentang cara-cara pemungutan dan pengisian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).
- c. Untuk memperoleh gambaran tentang seberapa besar sumbangan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diberikan PT. Telkom Kancatel Lumajang untuk menambah penerimaan negara.

1.3.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Kegunaan Praktek Kerja Nyata adalah:

- a. Agar kita dapat membandingkan antara teori yang telah diperoleh selama pendidikan di bangku kuliah dengan praktek kerja di lapangan secara nyata sehingga diharapkan dari hasil kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mempraktekannya sendiri kelak di dunia kerja dan masyarakat.
- b. Agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari pelaksanaan praktek kerja ini untuk menuju ke arah profesionalisme.
- c. Agar dapat menambah wawasan tentang ruang lingkup dunia kerja secara nyata.

- d. Untuk menambah referensi di Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.4 Jangka waktu dan obyek praktek kerja nyata

1.4.1 Jangka waktu Praktek Kerja Nyata (PKN)

Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan. Mulai tanggal 5 Maret 2003 sampai dengan tanggal 28 Maret 2003. Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut ditetapkan atas kerjasama antara PT. Telkom Kancatel Lumajang dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.4.2 Obyek Praktek Kerja Nyata (PKN)

Obyek Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada kantor PT. Telkom Kancatel Lumajang Divisi Regional V Jawa Timur. Kantor PT. Telkom Kancatel Lumajang beralamatkan di Jl. PB. Sudirman 20 Lumajang. Praktek Kerja Nyata (PKN) baru dapat dilaksanakan sesuai dengan Obyek Praktek Kerja Nyata, setelah mendapat persetujuan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Telekomunikasi PT.Telkom Indonesia, tbk.

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia untuk berhubungan secara umum. Dalam pengertian yang luas komunikasi adalah sumber dan aliran dari imajinasi atau citra dalam bentuk-bentuk yang dapat dikaji dan dimengerti. Munculnya teknologi listrik mendukung dan mengefektifkan sarana komunikasi sehingga komunikasi jarak jauh tercipta dalam bentuk telepon dan telegraf.

Telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1870. Jauh sebelum ditemukannya telepon pada tahun 1870 itu, tahun 1855 pemerintah Hindia Belanda memperoleh izin dari pemerintah kerajaan di negeri Belanda untuk mendirikan usaha pelayanan jasa telegraf elektromagnetik di Indonesia. Tahun 1856 saluran telegraf pertama dipasang antara Batavia (Jakarta) dengan Buitenzork (Bogor) yang selesai pada tanggal 23 Oktober 1856. Pada waktu itu tiang-tiang telegraf masih berupa pohon randu yang sudah ada atau menanam baru. Penggunaan telegraf secara resmi pertama kali ditandai dengan pengiriman telegraf oleh Ir. Groll Kepala Dinas Telegraf pemerintah dari Batavia Centrum (Jakarta Kota) kepada Gubernur jendral C.F. Pahud di Buitenzork (Bogor). Sejak itu dimulailah era telekomunikasi umum di Indonesia yang semula hanya diperuntukkan bagi pemerintah.

Pada tahun 1870 di negeri ini juga terjadi peristiwa penting yaitu berakhirnya secara resmi sistem tanam paksa dan terbitnya dua Undang-Undang (UU) penting yaitu Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Hal di atas sekedar menjelaskan bahwa di Hindia Belanda pada waktu itu juga terjadi peristiwa-peristiwa penting. Sedikit banyak kebijakan-kebijakan yang di terbitkannya itu akan turut mewarnai berbagai aktivitas termasuk bidang pertelekomunikasian kelak. Kendati peran pemerintah pada waktu itu dominan maka di bidang telekomunikasi tidak diprakarsai oleh lembaga pemerintah melainkan oleh lembaga swasta. Dalam waktu 5 tahun setelah Bell mempatenkan telepon di Amerika Serikat sebuah perusahaan Belanda mulai merentangkan kawat telepon dari Tanjung Periok ke Gambir, pusat kota Batavia (Jakarta),

karena pemasangan tersebut dianggap prospektif maka pemerintah Hindia Belanda menerbitkan keputusan nomor 5 tanggal 31 Juli 1881 yang memberi konsesi pada sebuah perusahaan swasta Belanda untuk menyelenggarakan jasa telepon di Gambir, Batavia, Tanjung Periok, Semarang, dan Surabaya. Tiga daerah pertama itu diresmikan penggunaannya pada tanggal 16 Oktober 1884. Dua tahun kemudian (1886) diresmikan penggunaan jasa telepon di Semarang disusul kemudian di Surabaya. Konsesi yang diberikan pada satu perusahaan swasta 25 tahun dan tampak prospektif ini ternyata dalam perkembangannya diikuti oleh puluhan perusahaan swasta lainnya kira-kira 38 perusahaan untuk meminta konsesi bagi penyelenggara layanan jasa telepon yang sama.

Menjelang akhir abad ke-19, kira-kira tahun 1897 sebuah perusahaan swasta yang bernama Intercomunal Telepon Maatschappij memperoleh konsesi untuk menyelenggarakan layanan telepon jarak jauh (Interlokal). Lama konsesi tersebut 25 tahun, dalam hal ini hubungan Interlokal yang terpenting adalah Saluran Jakarta-Semarang, mulai tanggal 16 Nopember 1896, Jakarta-Surabaya mulai tanggal 7 Desember 1896, saluran Jakarta-Bogor mulai tanggal 17 Mei 1898, saluran Bogor-Sukabumi mulai 12 Juni 1898 dan saluran Sukabumi-Bandung mulai tanggal 15 Juli 1898. Awal dari segi teknis layanan telepon pada waktu itu dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan baterai kering yang dipasangkan pada setiap unit yang biasa disebut sistem LB (Lokal Baterai).

Dalam perkembangannya perusahaan telepon itu ternyata lebih berorientasi laba dan menginginkan pengembalian modal secara cepat. Akibatnya aspek pelayanan ini menjadi terabaikan. Atas keadaan ini pemerintah mengambil keputusan untuk tidak memperpanjang konsesi-konsesi yang telah diberikan dan menyediakan perusahaan telepon menjadi urusan pemerintah Hindia Belanda. Tanggal 20 September 1906, sekaligus diproklamirkan sebagai hari lahir PTT (Pos, Telegram, Telepon) dalam sistem administrasi pemerintah yang pertama di Indonesia. Khusus mengenai Telepon terjadi banyak kemajuan yang berarti. Perubahan dan kemajuan itu seperti dibukanya sendiri oleh pemerintah layanan telepon di luar Jawa, yaitu di Jambi dan Palembang. Dengan digantinya kawat telepon tunggal tak berbalut dengan kabel pilin ganda berbalut karet, sistem

baterai lokal diganti menjadi sistem baterai terpusat. Selain itu dipasang kabel di bawah tanah sebagai pengganti kawat di atas tanah. Tahun 1916 diresmikannya penggunaan sistem distribusi otomatis dari Ericsson. Dengan demikian dibukanya “telepon distrik”, yang pada prinsipnya adalah telepon pedesaan untuk wilayah yang jauh dari pusat.

Sejak tahun 1970 Pos, Telegram, Telepon (PTT) dipimpin oleh seorang dengan jabatan Kepala Dinas Pos, Telegram, Telepon (PTT). Institusi Pos, Telegram, Telepon (PTT) tidak lepas dari gerakan buruh pada tanggal 20 Mei 1908. Gerakan yang terkenal waktu itu adalah berdirinya Gerakan Pegawai Candu dan Garam tahun 1913, dan Gerakan Postel pada tahun 1917. Selama kira-kira 4-5 dekade awal abad ke-20, proses ekspansi Pos, Telegram, Telepon (PTT) di sebuah institusi besar juga tidak pernah lepas dari berbagai gerakan perjuangan melawan pendudukan Belanda dan Jepang. Hal ini menjadi bukti bahwa Pos, Telegram, Telepon (PTT) mempunyai solidaritas tinggi terhadap perjuangan, juga institusi Pos, Telegram, Telepon (PTT) mempunyai makna strategis Pos, Telegram, Telepon (PTT) kelak diproyeksikan mampu menciptakan kesatuan nusantara, menyebarluaskan Proklamasi dan berita-berita penting lainnya.

Dua tahun menjelang Perang Dunia I (28 Juli 1914) yang melanda daratan Eropa, di Indonesia ada peristiwa penting yaitu terbentuknya organisasi baru di Bandung bernama *Indische Partij* pada tanggal 6 September 1912. Sekalipun di dalam negeri keadaanya seperti itu, ternyata perang justru memacu perkembangan teknologi telekomunikasi. Pada masa itu juga teknologi telepon melalui radio disempurnakan. Ketika telepon radio dihidupkan kembali, pancaran berita radio dari philips di Eindhoven (Belanda) berhasil ditangkap di Indonesia pada tahun 1927. Telepon radio digunakan untuk keperluan jarak jauh juga internasional, dari sinilah awal munculnya telekomunikasi internasional Indonesia. Jalur telepon radio untuk hubungan internasional Indonesia-Belanda diresmikan pada tahun 1929. Telepon hanya bisa dilakukan di kota-kota besar. Namun pada tahun 1931 dapat dilakukan di rumah maupun di kantor.

Di bawah pimpinan Angkatan Perang Jepang, kekuasaan atas Indonesia dibagi jadi tiga daerah militer yaitu: Sumatera, Jawa, Ujungpandang. Pembagian

tiga wilayah itu berimplikasi pula pada pembagian wilayah administrasi Pos, Telegram, Telepon (PTT). Pada waktu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 10 Agustus 1945, tanggal 27 September 1945 dilakukan penyerbuan ke Kantor Pusat Pos, Telegram, Telepon (PTT) dan berhasil. Sejak saat itu Mas Soeharto diumumkan sebagai Kepala Jawatan Pos, Telegram, Telepon (PTT) Republik Indonesia dan R. Dijar sebagai wakilnya.

Pada masa Orde Baru pertumbuhan dan perkembangan telekomunikasi meningkat dengan pesat. Hal ini ditandai dengan keberhasilan Indonesia Mengembangkan Sistem Telekomunikasi Nusantara, dan puncaknya setelah diluncurkannya satelit Palapa generasi pertama untuk menunjang sistem tersebut. Tahun 1951-1952, mulai dilakukan survei Hubungan Sinar (gelombang sangat pendek) antara Jakarta-Bandung. Tahun 1952 mulai dipasang terminal pemancar-pemancar di Jakarta pada Kantor telepon Gambir dan Bandung. Pemancar yang digunakan adalah buatan Inggris. Tahun 1952 bulan Maret dipasang teleprinter. Hubungan teleprinter yaitu Jakarta (18 saluran), Bandung (17 saluran), Surabaya (2 saluran), Semarang (1 saluran), Medan (1 saluran), Ujungpandang (1 saluran), Palembang (1 saluran). Hubungan Luar negeri: Jakarta-Amsterdam dan Jakarta-Manila. Otomatisasi telepon di Indonesia dimulai tanggal 10 Oktober 1953, Otomatisasi telepon pertama kali dilakukan oleh Sentral Telepon Otomat Bandung yang 4000 nomor dan 500 nomor untuk Sentral Telepon Otomat Cihampelas. Dalam tahun 1954 Pos, Telegram, Telepon (PTT) berhasil memulihkan 216 km saluran telegraf dan 250 km saluran interlokal. Tanggal 27 September 1954, Sentral Telepon Otomat Ujung pandang dengan kapasitas 3000 nomor telah diresmikan. Tanggal 24 Oktober 1954 telah diresmikan juga Sentral Telepon Otomat Kebayoran dengan kapasitas 4000 nomor.

Pada tanggal 27 September 1955 instalasi stasiun pemancar "Pancar Daya" di Kaliangke diresmikan oleh Jawatan Pos, Telegram, Telepon (PTT), dan seminggu kemudian diresmikan stasiun penerima Batu Ceper. Dalam tahun 1958 telah berhasil diselesaikan pembangunan 5 buah gedung baru untuk sentral telepon Otomat yaitu: Tanjung Periok (Jakarta), Cicadas (Bandung Timur), Malang, Jakarta Kota, dan Darmo (Surabaya) serta 8 buah gedung untuk kantor

telepon di Jawa dan Sumatera. Dalam Kurun waktu lima tahun antara 1956-1959 disebut oleh Pos, Telegram, Telepon (PTT) sebagai masa investasi terbatas. Pada tahun 1961 dibuka perhubungan telegraf saluran sewa untuk maskapai penerbangan asing. Pada tanggal 4 Januari 1961 di Jakarta telah dibuka jaringan telex Indonesia. Telex merupakan sebutan untuk alat penghubung langsung dan otomatis dengan antar pelanggan baik dalam hubungan interlokal maupun internasional.

Pada tanggal 9 Juni 1967 untuk membangun sebuah stasiun bumi, dan baru selesai pada tanggal 27 September 1969, yang penggunaannya diresmikan oleh Presiden Soeharto. Maka dari itu pada tanggal 10 November 1968 didirikanlah PT Indosat, dan mulai dilakukan pembangunan jaringan gelombang mikro se Jawa-Bali yang selesai tahun 1973 dan diresmikannya tanggal 10 Maret 1973 oleh Presiden Soeharto. Menyusul kemudian pembangunan Jakarta-Palembang, pembangunan gelombang mikro Indonesia Timur yang diresmikan pada tanggal 16 Juni 1978. Salah satu bagian dari Sistem Telekomunikasi Nusantara adalah pembangunan Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD). Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) dibangun melalui peluncuran Satelit Palapa, lalu disusul Satelit Palapa A2 dan Palapa B2. Satelit Palapa dapat menyalurkan secara serentak 6000 saluran telepon dan 12 saluran televisi.

Setelah Pos, Telegram, Telepon (PTT) berhasil direbut dan bersamaan dengan masuknya Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1950 pengelola telekomunikasi Indonesia juga masuk menjadi anggota *International Telecommunication Union* (ITU), dengan SK Presiden RI No 203. Tanggal 12 Oktober 1954 terdapat perubahan jabatan dalam Jawatan Pos, Telegram, Telepon (PTT): Kepala Jawatan Pos, Telegram, Telepon (PTT) dirubah menjadi Direktur Jendral Pos, Telegram, Telepon (PTT). Kepala Perusahaan Pos dirubah menjadi Direktur Pos, sedangkan Kepala Perusahaan Telekomunikasi dirubah menjadi Direktur Telekomunikasi. Tanggal 21 Desember 1961 dikeluarkan PP No. 240 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi disingkat PN. Postel. Peraturan Pemerintah itu berlaku mulai tanggal 1 Januari 1962, dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri

Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi, Pariwisata tanggal 13 Agustus 1964 ditetapkan struktur organisasi PN Postel dipimpin oleh Direktur Jenderal dibantu oleh tiga orang Direktur Staf dan tiga Direktur Perusahaan dan dua Direktur Muda Perusahaan. Pada tahun itu juga dikeluarkan UU No. 5 tahun 1964 telekomunikasi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: telekomunikasi umum, telekomunikasi untuk keperluan khusus instansi pemerintah dan telekomunikasi yang diserahkan ke swasta.

Dalam sebuah pertemuan informal pada tahun 1964 terdapat usulan agar telekomunikasi dapat dipisahkan dari pos yang dikenal dengan "Deklarasi Kaliurang". Deklarasi tersebut diwujudkan pemerintah dengan memecah PN. Postel menjadi dua perusahaan negara pertama PN. Pos dan Giro yang dibentuk dengan PP No. 29 tahun 1965 dan PN. Telekomunikasi dibentuk berdasar PP No. 30 tahun 1965. Pada tahun 1970 Sutanggar Tengker diangkat menjadi Dirut PN. Telekomunikasi untuk menggantikan Sabar Soedirman. Berdasarkan PP No. 36 Tahun 1974 PN. Telekomunikasi dirubah menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel), dan Willy Moenandir yang menjabat sebagai Direktur Utamanya. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974 dirubah dengan dikeluarkan PP No. 53 tahun 1980 bahwa Perumtel ditetapkan sebagai penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan PT. Indosat ditetapkan sebagai penyelenggara telekomunikasi untuk umum Internasional. Pada tahun 1988 Willy Moenandir digantikan oleh Cacuk Sudarjanto, ia menyodorkan program pedoman dan kiat untuk seluruh karyawan yaitu 3-2-1.

Maksud dari program itu angka 3 mencerminkan tiga sasaran pokok perusahaan yaitu pelayanan terbaik, hasil terbaik dan citra terbaik. Angka 2 bermakna dua strategi perusahaan dalam upaya mencapai sasaran di atas yaitu pertama, mengembangkan dan menggunakan seluruh sistem dan kesisteman. Kedua, membina dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan angka 1 disebut sebagai modal dasar yaitu semangat kerja sama, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Cacuk mendirikan Sekolah Tingkat Tinggi Telkom (STT Telkom), dan mengaktifkan kursus-kursus pimpinan (SUSPIM). Di masa ini

juga badan usaha ini mendapat pernyataan/opini Wajar Tanpa Syarat (WTS) atas laporan keuangan perumtel tahun 1989. Berdasarkan PP No. 25 tahun 1991 Perumtel dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan dengan nama PT. Telkom (Persero). Dalam rangka menyesuaikan perkembangan zaman, perusahaan ini menggunakan logo baru bergambar lingkaran dengan garis-garis gradasi warna biru dengan bentuk memutarnya sekitar 45 derajat.

Logo tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Bentuk visual logo: misi telkom yang mantap, modern, luwes, sederhana, cepat terlihat secara utuh.
- b. Menggambarkan dunia telekomunikasi modern melalui teknologi mutakhir yang tercermin dalam citra keseluruhan.
- c. Gambaran sifat komunikasi kerja sama yang selaras secara berkesinambungan dan dinamis, digambarkan oleh garis-garis yang mengesankan gerak beraturan dengan warna dominan biru tua dan biru muda yang bergradasi membentuk kesatuan visual, grafis yang utuh.
- d. Warna biru tua dan biru muda gradasi yang menggambarkan teknologi tinggi telekomunikasi yang berkembang dalam suasana masa depan yang gemilang.
- e. Ruang gerak Telkom secara nasional dan internasional tergambar dalam bentuk bulatan dari logo.
- f. Bentuk bulat yang berwarna biru tua menggambarkan utuhnya Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD'45, yang dipersatukan oleh telekomunikasi.
- g. Bentuk huruf yang dipakai mencerminkan karakter modern, kokoh, berwibawa, kompak namun tetap sederhana dan mudah dibaca.
- h. Secara teknis cetak modern, spesifikasi warna biru gradasi tidak sulit untuk diproduksi.

Setahun setelah perumtel berubah menjadi PT. Telkom (Persero). Cacuk digantikan oleh Setyanto.P.Santosa, yang menjadi perhatian utama dari Setyanto adalah *Back to Basic*, yang ia maksudkan ialah kembali pada organisasi profesional yang menuntut unsur-unsur didalamnya harus profesional atau

kembali pada perilaku yang profesional. Setyanto memperkenalkan konsepsi budaya perusahaan yang disebut ARTI (Akronim dari Akurat, Responsif dan Simpatik). Tiga program besar yang berhasil diwujudkan adalah *strukturisasi internal*, Kerja Sama Operasi (KSO) dan *Initial Public Offering* (IPO).

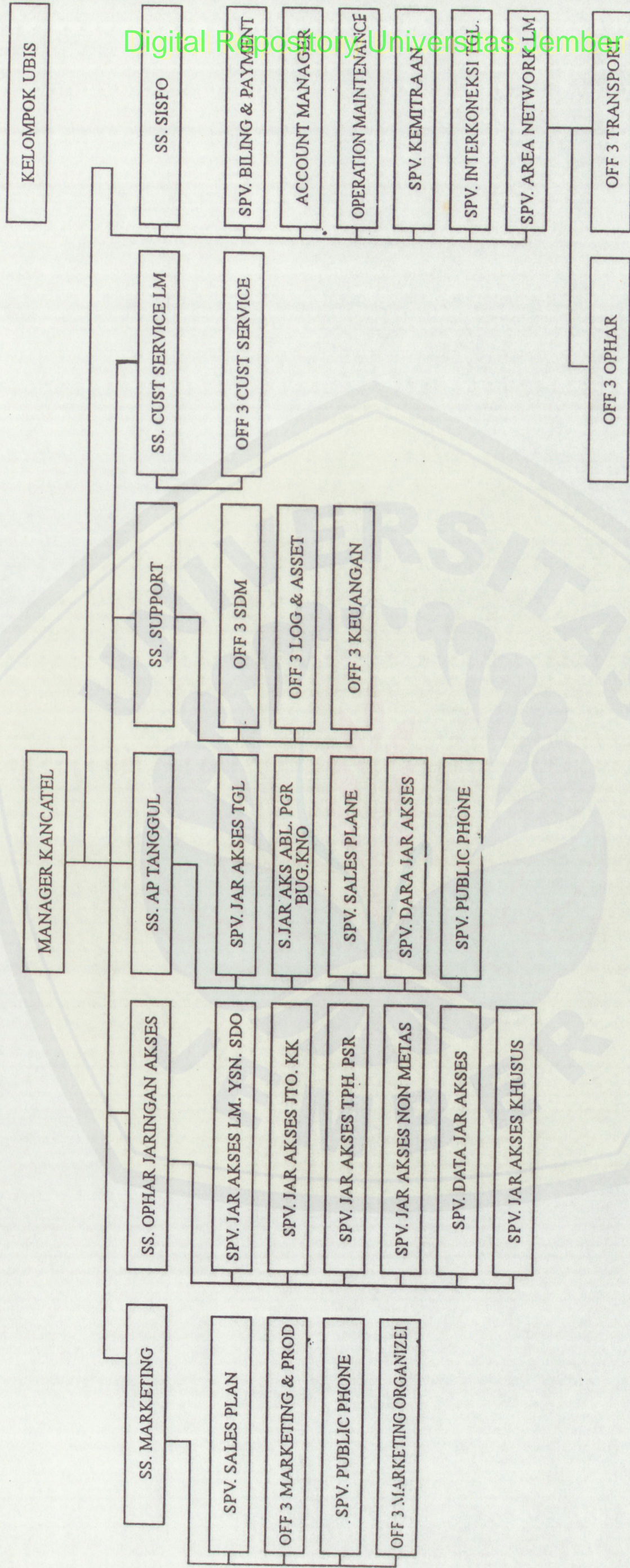
Mulai bulan Mei tahun 1996, Setyanto digantikan oleh A.A. Nasution sebagai Direktur Utama PT. Telkom. Pada saat itu diluncurkannya satelit dengan nama Telkom-1 yang menggantikan satelit Palapa B2R yang akan habis masa operasinya tahun 1999. Satelit ini diluncurkan akhir 1998. PT. Telkom juga berhasil mengurangi pegawai melalui Keputusan Direksi Nomor 57, tentang Pensiunan Dini. Dalam program pensiun dini ini sebanyak 5000 karyawan menarik diri tanpa ada gejolak sedikitpun. Sejak direbutnya Kantor Pos, Telegram, Telepon (PTT) Pusat di Bandung oleh Angkatan Muda Pos, Telegram, Telepon (PTT) dari tangan Jepang hingga saat ini terdapat tiga hambatan pokok yaitu: hambatan karena faktor alami, karena faktor Sumber Daya Manusia (SDM), karena faktor eksternal. Secara garis besar kendala yang dihadapi Indonesia yang akan mempengaruhi peranan telekomunikasi bagi pembangunan nasional antara lain adalah sumber dana yang terbatas, program alih teknologi yang berjalan lambat, dukungan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang belum memadai dan terpadu.

2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

2.2.1 Struktur Organisasi

Bagi suatu perusahaan diperlukan suatu organisasi yang baik, baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar. PT. Telkom Indonesia, Tbk merupakan perusahaan milik negara (BUMD). Bentuk organisasi PT. Telkom adalah bentuk organisasi garis dengan staf. Dalam hal ini antara staf satu dengan lainnya atau antar bagian saling terkait dan saling bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu tidak mungkin suatu perusahaan itu akan berhasil kalau antara satu dengan lainnya tidak saling membantu.

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Telkom Kancatel Lumajang.



Sumber: PT. Telkom Kancatel Lumajang.

2.2.2 Uraian Tugas.

a. *Manager* Kancatel Lumajang

Tugas utama :

- 1) Memberikan kepuasan kepada *customer* dengan meningkatkan kinerja Kancatel melalui penyediaan layanan jasa Pelayanan *Ordinary* Telepon Sistem (POTS), peningkatan usage produksi, pengoprasian dan pemeliharaan jaringan akses pelanggan serta pemberdayaan sumber daya yang menjadi kewenangannya.

Kebebasan bertindak :

- 1) Menjabarkan visi, tujuan, strategi pemasaran Pelayanan *Ordinary* Telepon Sistem (POTS) dan pengelolaan jaringan akses.
- 2) Menetapkan sasaran dan metode proses pemasaran Pelayanan *Ordinary* Telepon Sistem (POTS) dan pengelolaan jaringan akses yang optimal kepada pelanggan.
- 3) Mengatur pelaksanaan operasi dan pemeliharaan untuk meningkatkan performansi jaringan akses.
- 4) Mengelola sumber daya (keuangan, informasi, dsb) untuk keperluan pelaksanaan operasi di Kancatel Lumajang.

b. *Senior Supervisor Support*

Tugas utama :

- 1) Memberikan support atau dukungan kepada management Kancatel agar organisasi dapat berjalan dengan baik melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- 2) Mengelola sumber daya yang menjadi kewenangan intinya.

Kebebasan bertindak :

- 1) Memberikan rekomendasi permintaan barang, sarana dan prasarana.
- 2) Memberikan rekomendasi layanan administrasi Sumber Daya Manusia (SDM).
- 3) Memberikan rekomendasi pelatihan dan pengembangan.
- 4) Mengkoordinir *implementasi Quality Management System*.

c. *Officer 3 Keuangan*

Tugas utama :

- 1) Membuat laporan keuangan.
- 2) Melaksanakan verifikasi pertanggung.
- 3) Mengkoordinir pengumpulan data untuk pelaksanaan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan).
- 4) Melaksanakan pengentrian/pencatatan ke modul SIMAK (Sistem Informasi *Management Aplikasi*).
- 5) Memelihara sistem dan prosedur transaksi.
- 6) Membuat analisa dan laporan keuangan untuk akuntansi dan pelaporan.

Kebebasan bertindak :

- 1) Merekomendasikan solusi tentang kelayakan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Menginformasikan metode penetapan *standart* biaya.
- 3) Memberikan bimbingan teknis penyelesaian pertanggung.
- 4) Implementasi metode penyelesaian tutup buku.

d. *Officer Logistik dan Asset*

Tugas utama :

- 1) Menyediakan barang umum dan teknik serta penyediaan layanan informasi jenis barang sesuai *spec*.
- 2) Pengelolaan sarana umum dan persediaan barang gudang.
- 3) Mengkoordinir pengadaan barang dan teknik.
- 4) Menyelenggarakan proses pengadaan barang umum dan teknik.
- 5) Mengawasi dan melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 6) Melayani permintaan barang dan mengerjakan administrasi gudang serta menata barang yang ada di gudang.

Kebebasan bertindak :

- 1) Mengelola sarana umum.
- 2) Memonitor penggunaan anggaran logistik.
- 3) Mengelola persediaan barang gudang dan distribusinya.
- 4) Mengkoordinir pengamanan asset perusahaan.

e. *Officer 3 Sumber Daya Manusia (SDM)*

Tugas utama :

- 1) Mengelola belanja pegawai.
- 2) Melaksanakan proses administrasi pegawai, pensiun, janda, dan mutasi keluar masuk calon pegawai.
- 3) Menyelesaikan restitusi pengobatan pegawai dan pensiun.
- 4) Melaksanakan analisa kesehatan dan keamanan lingkungan kerja.
- 5) Merencanakan dan membuat program pelaksanaan yang berkaitan dengan humas.
- 6) Mengawasi dan mengelola kesekretariatan.

Kebebasan bertindak :

- 1) Melaksanakan administrasi pegawai, pensiun dan janda.
- 2) Memberikan usulan promosi dan mutasi pegawai.
- 3) Menyelesaikan dan mengusulkan pelatihan penghargaan.
- 4) Memberikan informasi tentang pelanggaran disiplin.
- 5) Mengusulkan anggaran pengadaan sarana kesehatan kerja pegawai.
- 6) Mengusulkan program kesehatan dan keamanan kerja.
- 7) Mengelola dan mengarahkan kegiatan humas dan kesekretariatan.
- 8) Melaksanakan protokoler.
- 9) Bertanggungjawab atas pencapaian sasaran oprasional dan pemeliharaan perangkat sentral, telepon/telegram, transisi, catu daya dan jaringan kabel serta perbaikan perangkat telekomunikasi di Kancatel.

f. *Senior Supervisor Marketing*

Tugas utama :

- 1) Meningkatkan kinerja Kancatel dan mencapai target pemasaran Pelayanan *Ordinary* Telepon Sistem (POTS), melalui pengelolaan promosi dan penjualan, pengelolaan *customer data base*, pengelolaan *usage* dan *quality improvement*.
- 2) Mengelola sumber daya yang menjadi kewenangannya.

Kebebasan bertindak :

- 1) Menetapkan strategi dan kebijakan promosi dan pemasaran.
- 2) Memberikan usulan *bundling* dan *pricing* produk Pelayanan *Ordinary* Telepon Sistem (POTS).
- 3) Menetapkan strategi kebijakan *usage quality improvement*.
- 4) Merekomendasikan mutasi pegawai intern bidang pemasaran.
- 5) Menetapkan kebijakan pengelolaan *customer data base*.

g. *Supervisor Sales Plan*

Tugas utama :

- 1) Merencanakan, mengorganisir, dan mengimplementasikan strategi promosi dan penjualan Pelayanan *Ordinary* Telepon Sistem (POTS), serta pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan unitnya untuk mendukung pekerjaan dan pencapaian target pemasaran.

Kebebasan bertindak :

- 1) Menyusun rencana dan strategi pemasaran Pelayanan *Ordinary* Telepon Sistem (POTS).
- 2) Mengusulkan kerja sama dengan pihak Pelayanan *Ordinary* Telepon Sistem (POTS). Ketiga untuk mengelola kegiatan promosi dan penjualan Pelayanan *Ordinary*.
- 3) Menyusun rekomendasi hasil-hasil analisa pemasaran Pelayanan *Ordinary* Telepon Sistem (POTS).

h. *Supervisor Public phone*

Tugas utama :

- 1) Meningkatkan performansi layanan *public phone* baik kualitas dan kuantitas, meningkatkan pendapatan telepon umum, serta mengelola sumber daya yang menjadi kewenangan unitnya untuk mendukung pekerjaan dan target Kancatel.

Kebebasan bertindak :

- 1) Mengusulkan pengembangan pasar telum dan wartel di wilayahnya.
- 2) Bersama *Manager Marketing* membuat rekomendasi pendirian *public phone*.
- 3) Menyusun rekomendasi program dan distribusi anggaran *public service*.

3) Mengelola sumber daya yang menjadi kewenangan unitnya.

Kebebasan Bertindak :

- 1) Mengatur personel internal jaringan akses.
- 2) Mengambil langkah untuk meningkatkan performansi (kualitas dan kuantitas) jaringan akses.
- 3) Melaksanakan rehabilitasi dan ekspansi jaringan akses.

d. *Supervisor Jaringan Akses Sektor*

Tugas Utama :

- 1) Melaksanakan maintenance jaringan akses baik yang bersifat preventif maupun korektif untuk meningkatkan performansi jaringan (*reability dan availability*).
- 2) Melaksanakan operasi dan layanan jaringan akses (PSB, mutasi, dan lain-lain).

Kebebasan Bertindak :

- 1) Mengatur personel internal jaringan akses.
- 2) Mengambil langkah untuk meningkatkan performansi (kualitas dan kuantitas) jaringan akses.
- 3) Memberikan usulan rehabilitasi dan ekspansi jaringan akses.

e. *Supervisor Jaringan Akses Non Metal*

Tugas Utama :

- 1) Melaksanakan maintenance jaringan akses baik yang bersifat preventif maupun kolektif untuk meningkatkan performansi jaringan (*reability dan availability*).
- 2) Melaksanakan operasi dan layanan jaringan akses (mutasi).

Kebebasan Bertindak :

- 1) Menentukan skala prioritas pekerjaan.
- 2) Mengendalikan instalasi PSB/mutasi dan penanganan gangguan jaringan *Akses Non Metal*.
- 3) Mengusulkan solusi permasalahan jaringan *Akses Non Metal* di lapangan.
- 4) Mengelola sumber daya yang menjadi kewenangan unitnya.

h. *Senior Supervisor* Pelayanan Tanggul

Tugas Utama :

- 1) Menyelenggarakan layanan jasa Pelayanan *Ordinary* Telepon Sistem (POTS), pengoperasian dan pemeliharaan jaringan akses pelanggan serta pemberdayaan sumber daya yang menjadi kewenangan unitnya.
- 2) Mengelola sumber daya yang menjadi kewenangan unitnya.

Kebebasan Bertindak :

- 1) Menjabarkan strategi pemasaran Pelayanan *Ordinary* Telepon Sistem (POTS) dan pengelolaan jaringan akses.
- 2) Mengusulkan metode dan proses pemasaran Pelayanan *Ordinary* Telepon Sistem (POTS) dan pengelolaan jaringan akses yang optimal kepada pelanggan.
- 3) Mengatur pelaksanaan operasional dan pemeliharaan untuk meningkatkan performansi jaringan akses.

Dalam operasional sehari-hari, *Manager* Kancatel juga dibantu oleh unit bisnis lain. Setiap unit bisnis secara operasional bertanggung jawab langsung pada *General Manager* PT. Telkom Divisi Regional V Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya. PT. Telkom Divisi Regional V Jawa Timur memegang kendali/mengontrol kegiatan-kegiatan perusahaan pada cabang-cabang PT. Telkom setiap daerah di wilayah Jawa Timur.

2.3 Visi dan Misi PT.Telkom Indonesia, tbk.

2.3.1 Visi PT. Telkom

Dalam menjalankan perusahaan, PT. Telkom mempunyai suatu visi yaitu menjadi Dominan *InfoCom Player* di Kawasan Regional V Jawa Timur. Penyebarluasan fungsi telepon dilakukan di berbagai pelosok dan di berbagai kalangan di kawasan Jawa Timur. Baik itu pelosok pedesaan maupun pelosok perkotaan. Begitu juga penyebarluasan fungsi telepon dilakukan pada berbagai kalangan baik kalangan masyarakat miskin maupun kalangan masyarakat kaya.

2.3.2 Misi PT. Telkom

- a. Memberikan Pelayanan “ *One Stop InfoCom* “ dengan kualitas yang prima dan harga yang kompetitif.
- b. Mengelola usaha melalui cara yang terbaik, dengan mengoptimalkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul, teknologi yang kompetitif serta *Business Partner* yang sinergi.

2.4 Etos Kerja 4@S PT.Telkom Divisi Regional V Jawa Timur

2.4.1 Kerja Ker@s

Yang mengandung makna giat bersemangat tidak mengenal lelah, pantang menyerah, tekun, cermat, rajin dan disiplin.

2.4.2 Kerja Cerd@s

Mengandung makna intelegent konseptual terstruktur, terencana, pola pikir intelektual, efisien, efektif, wawasan luas, *creative* dan *inovative*.

2.4.3 Kerja Tunt@s

Mengandung makna bekerja sampai tuntas, serius, ulet, memecahkan persoalan dan selalu berpikir mencapai tujuan.

2.4.4 Kerja Ikhl@s

Mengandung makna sepi ing pamrih rame ing gawe, tanpa pamrih dan yakin bahwa Tuhan YME selalu melihat kita jujur dan berakhlak/moral tinggi, konsekwen dan bertanggung jawab.

2.5 Kebijakan Mutu PT. Telkom Divisi Regional V Jawa Timur

Telkom Divisi Regional V Jawa Timur memiliki Komitmen untuk menyediakan jasa InfoCom bermutu tinggi. Dalam hal pemenuhan harapan Masyarakat dan Perusahaan yang sesuai hukum dan perUndang-undangan, dengan menerapkan *Telkom Quality Management System (T-QMS)* berdasarkan ISO 9001: 2000 . Keterlibatan seluruh karyawan dalam melakukan peningkatan mutu serta aktif dan berkesinambungan sangat berguna untuk memuaskan pelanggan, karyawan dan pemilik Perusahaan itu sendiri.

2.6 Kebijakan 3 – 5 – 2 PT.Telkom Indonesia, tbk.

Kebijakan Pencapaian Target Bisnis 2003

2.6.1 3 Program Utama

- a. Mempertahankan Pelanggan (Retensi).
- b. Merebut Pelanggan Sambungan Langsung Internasional (SLI) Kompetitor (Akuisisi).
- c. Menambah Jumlah Pelanggan Baru.

2.6.2 5 Program Pendukung

- a. Mempertajam *Leadership Style*.
- b. Menggiatkan *Management Review*.
- c. Meningkatkan Komunikasi *Internal*.
- d. Meningkatkan *Internal Partnering*.
- e. Mempertajam *Implementasi T-QMS (Telkom Quality Management System)*

2.6.3 2 Modal Utama

- a. *Trust* dan *Team Work*.
- b. Etos Kerja 4@S.

2.7 Kegiatan Usaha PT. Telkom Indonesia, tbk

Telepon bukan hanya alat untuk mengekspresikan isi hati dan perasaan semata dari jarak jauh, tapi juga sekaligus simbol/bentuk. Tampaklah dari sini, produk-produk unggulan Telkom juga menjadi bagian aktualisasi diri individu, yang pada gilirannya ikut mewarnai kepercayaan dirinya sebagai bagian dari masyarakat modern maksudnya bahwa ia mempunyai tingkat kehidupan yang lebih tinggi dari pada orang lain. Individu modern selalu ingin cepat dalam setiap langkah hidupnya dan sangat tergantung pada informasi. Telkom menyediakan produk-produk multimedia Telkom dengan kecanggihannya antara lain adalah:

- a. *Jasa Telkom Phone*.

Merupakan sambungan komunikasi yang ada di rumah atau kantor, yang biasanya disebut dengan telepon rumah atau dapat juga disebut dengan sambungan telepon pelanggan. *Jasa Telkom Phone* merupakan fasilitas telekomunikasi (Telepon atau *Facsimile*) yang ada di tempat pelanggan.

Pelanggan adalah badan hukum atau perorangan yang telah menandatangani perikatan/kontrak dengan Telkom untuk berlangganan sambungan telekomunikasi dan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari padanya.

b. Nada Sela.

Merupakan pelayanan telepon yang dapat mengetahui adanya panggilan masuk berupa sinyal putus-putus saat anda sedang melakukan pembicaraan dalam telepon. Dengan adanya nada sela ini kita dapat mengetahui bahwa ada panggilan lain yang masuk ke telepon kita. Pelayanan ini sangat berguna bagi orang-orang yang sibuk,^o yang mempunyai prinsip waktu adalah uang sehingga kita dapat mendahulukan telepon yang penting bagi kita/bagi perusahaan.

c. Lacak.

Merupakan fasilitas telepon, yang bermanfaat untuk mengalihkan tujuan panggilan nomor yang diinginkan sesuai dengan keperluan pelanggan. Semua panggilan secara otomatis dipindahkan ke nomor lain. Dengan menggunakan pelayanan Lacak kita dapat mengetahui nomor-nomor telepon yang masuk ke telepon kita. Hal tersebut dapat kita lakukan hanya dengan bantuan dari PT. Telkom.

d. Telkom Klip.

Merupakan fitur yang dapat mengetahui nomor telepon pemanggil sehingga kita dapat memberikan sapaan lebih akrab kepada relasi bisnis, keluarga, famili, atau teman dekat. Cukup sediakan terminal klip/CLIP (*Caller Line Identification preview*) atau terminal telepon yang telah dilengkapi display klip maka pelanggan dapat menikmati pelayanan ini. Pelayanan ini baru menjangkau beberapa lokasi saja di Jawa Timur.

e. Kartu Bebas.

Merupakan kartu panggil yang diluncurkan oleh PT. Telkom Divisi Regional V Jawa Timur, kartu ini dilengkapi dengan PIN. Terminal akses untuk kartu bebas ini meliputi: seluruh telepon rumah, telepon koin, telepon umum kartu. Jenis-jenis produk kartu bebas antara lain:

1) Kartu Perdana, yang terdiri dari:

a) Kartu Standart:

- (1) Pulsa dapat diisi ulang setiap saat.
- (2) Isi ulang dengan dial 12078 pilih menu 2.
- (3) Ikuti panduan voice.
- (4) Cukup mengingat PIN (PIN tidak diganti-ganti).

b) Kartu X-Tra:

(1) Dilengkapi fasilitas *discount*.

(2) Berlaku di beberapa kota.

2) Kartu Reguler/Voucher Isi Ulang.

a) Dapat digunakan untuk mengisi pulsa pada kartu perdana.

b) Dapat digunakan langsung untuk bertelepon.

c) Dilengkapi PIN sebanyak 12 digit.

f. *Voice Mail Box*.

Merupakan suatu jasa nilai tambah yang diberikan bagi pelanggan telepon yang berguna untuk merekam pesan telepon pada saat telepon pelanggan sedang digunakan, tidak ada yang mengangkat atau pada saat telepon rusak. Manfaatnya antara lain:

- 1) Kita tidak akan kehilangan informasi karena telepon memo akan merekam.
- 2) Dapat menyimpan pesan yang tidak tersampaikan tersebut.
- 3) Pesan yang tersimpan akan aman terjaga karena ada pengaman berganda, berupa nomor telepon, nomor *mail box* sekaligus dengan *password*.

g. *Tele Services*.

Merupakan pelayanan informasi yang dikemas secara *interaktif*. Menggunakan *Voice Response System* (VPS) dan *Tele Info*. Pelanggan bisa mendapatkan berbagai macam informasi, dengan dipandu oleh mesin penjawab otomatis dari PT. Telkom. Mesin penjawab otomatis tersebut dapat kita gunakan dengan 2 (dua) bahasa pilihan yaitu dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

h. Telkom *C-Phone*.

Merupakan sistem komunikasi tanpa kabel, dengan menggunakan teknologi *Code Division Multiple Access* (CDMA). Teknologi *Code Division Multiple Access* (CDMA) tersebut merupakan teknologi komunikasi tercanggih. Telkom C-Phone dapat digunakan dengan handphone *Code Division Multiple*

Access (CDMA) untuk orang-orang yang mempunyai mobilitas tinggi atau juga dengan *Fixed Wireless Terminal* (FWT) untuk rumah/kantor yang belum terjangkau sambungan telepon.

h. *Telkom Save*.

Merupakan pelayanan telepon hemat dari PT. Telkom yang memberikan kemudahan untuk percakapan internasional dengan biaya hemat. *Telkom Save* merupakan *brand name* pelayanan jasa telekomunikasi Telkom dengan menggunakan *Platform Internet Protocol/Voice Internet Protocol* (VOIP). *Telkom Save* mempunyai 2 (dua) jenis pelayanan antara lain:

1) *Telkom Save Prapaid/Prabayar*.

Telkom Save Prapaid/Prabayar ini berupa *Calling Card*. Pelayanan ini tersedia dalam pecahan Rp. 100.000,00, Rp. 150.000,00, dan Rp. 200.000,00 (belum termasuk PPN/Pajak Pertambahan Nilai). Dapat diisi ulang dengan mentransfer pulsa ke kartu lain dengan nomor akses 17017.

2) *Telkom Save Postpaid/Pasca Bayar*.

Telkom Save Postpaid/Pasca Bayar merupakan pelayanan *Telkom Save* yang berlangganan, dengan nomor akses 017. Untuk informasi pengaktifan *Telkom Save Postpaid/Pasca Bayar* dapat dilayani oleh Account Manager atau di kantor-kantor pelayanan PT. Telkom.

i. *Telkom Net-Instant*.

Merupakan solusi praktis dan ekonomis bagi pengguna internet yang tidak ingin melakukan berbagai kegiatan pendaftaran dan pembayaran yang cukup merepotkan. Untuk kepuasan pelanggan *Telkom Net-Instant* juga menyediakan berbagai fasilitas internet yang dapat dibuat secara mandiri oleh penggunanya. Fasilitas internet tersebut antara lain: mail gratis, Kecepatan akses ke internet (situs nasional maupun luar negeri) dengan kecepatan prima *Telkom Net-Mail*.

j. *Telkom Uni*.

Merupakan produk pelayanan yang berbasis *Intellegent Network* (IN) ini memungkinkan pelanggan telepon yang memiliki beberapa nomor telepon di beberapa lokasi dapat dihubungi dengan satu nomor yang unik secara nasional. Panggilan dengan menggunakan *Telkom Uni* akan diarahkan ke nomor telepon

yang terdekat dengan nomor telepon pemanggil. Telkom Uni ini ditujukan bagi perusahaan yang mempunyai *outlet* pelayanan *publik* di beberapa tempat/lokasi. Pelayanan ini cocok bagi perusahaan perbankan, perusahaan taxi, perusahaan travel.

k. Telkom *Vote*.

Merupakan produk pelayanan yang berbasis *Intellegent Network* (IN) ini menyediakan fasilitas pada Telkom *Vote* untuk melakukan survei opini *publik* atau jajak pendapat dengan menggunakan jaringan telepon dan hasilnya dapat diketahui secara langsung dalam waktu yang relatif singkat. Pelayanan ini dikenal sebagai pelayanan *Televoting* dengan nomor awalan 0806. Telkom *Vote* mempunyai manfaat antara lain:

- 1) Dapat mengetahui opini masyarakat terhadap permasalahan yang aktual baik masalah ekonomi, bisnis maupun politik secara nasional dengan cepat, akurat, mudah, dan murah.
- 2) Menghemat biaya.

l. Jasa *Telkom Pay Phone* (Telepon Umum).

Merupakan pelayanan telepon yang dipergunakan untuk umum/*public*. Pelayanan telepon umum tersebut antara lain:

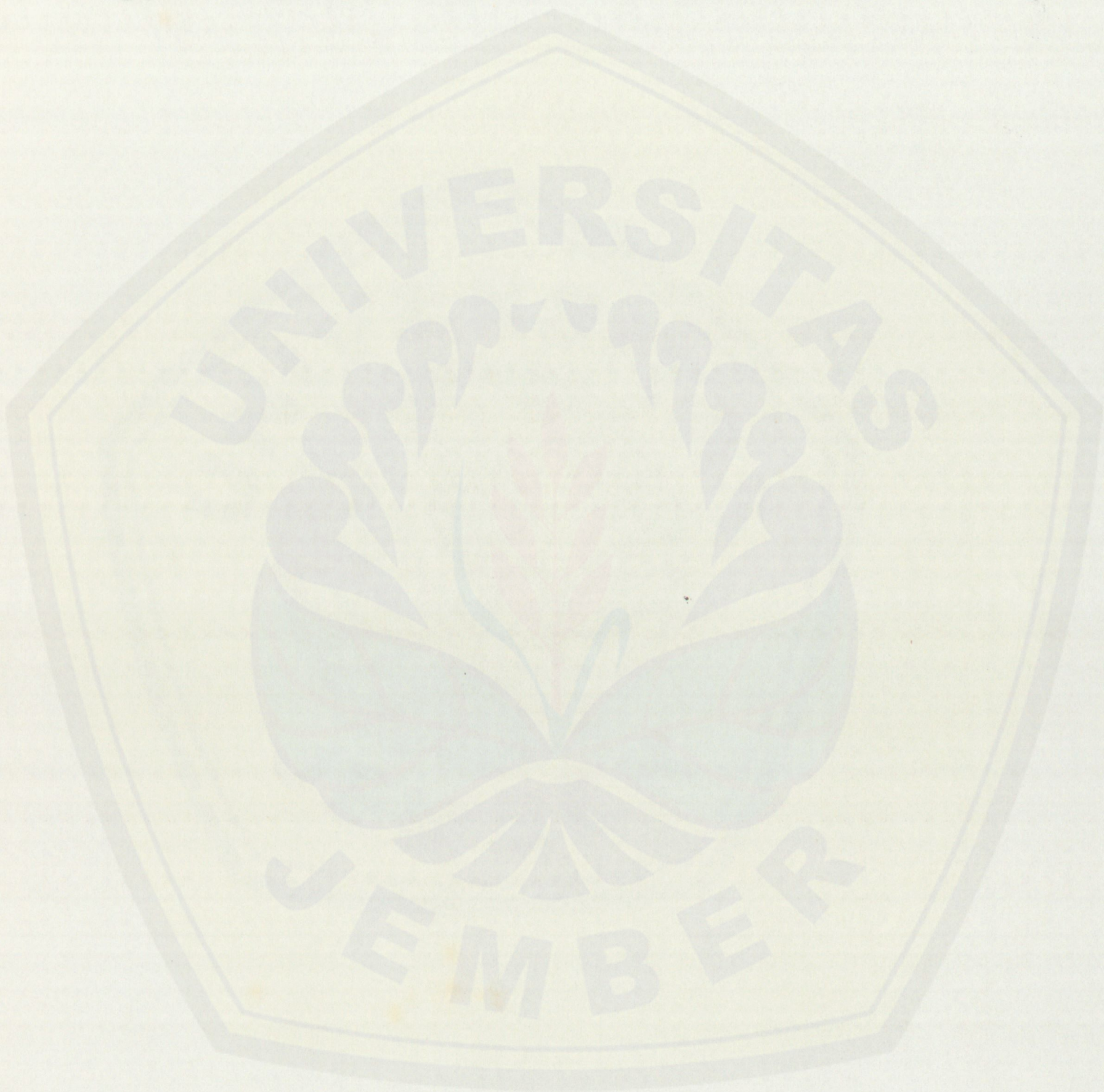
- 1) Telepon Umum Koin (TUC).
- 2) Telepon Umum Koin Pelanggan (TUCP).
- 3) Telepon Umum Kartu (TUK).

2.8 Penggajian Karyawan PT. Telkom Kancatel Lumajang.

Penggajian pada PT. Telkom Kancatel Lumajang merupakan kompensasi yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada para karyawannya yang disesuaikan dengan jabatan. Cara-cara penggajian karyawan di PT. Telkom Kancatel Lumajang tersebut antara lain :

- 2.8.1 Gaji karyawan dihitung berdasarkan Band Individu dan Band Posisi, serta berdasarkan prestasi individu masing-masing karyawan.

- 2.8.2 Proses penggajian dilakukan di Kandatel Jember.
- 2.8.3 Setiap bulan officer 3 SDM (Sumber Daya Manusia) Kancatel Lumajang menerima hasil perhitungan gaji masing-masing karyawan melalui internet.
- 2.8.4 Berdasarkan data yang diterima dibuatlah surat ke Bank untuk mentransfer gaji ke masing-masing karyawan melalui rekening masing-masing.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1. Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan sebagai satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar A.Md (Ahli Madya) di bidang Perpajakan khususnya. Mahasiswa diwajibkan melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) jika telah menyelesaikan minimal 90 sks. Objek Praktek Kerja Nyata (PKN) dapat dilaksanakan pada Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT.Telkom Kancatel Lumajang yang terletak di Jl. PB. Sudirman No 20 Lumajang.

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh penulis sebelum memulai kegiatan Praktek Kerja Nyata. Tahapan-tahapan tersebut antara lain :

- a. Melakukan survei/pengamatan ke Kantor PT. Telkom Kancatel Lumajang Apakah menerima Praktek Kerja Nyata atau tidak.
- b. Meminta surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, untuk mendapatkan izin Praktek Kerja Nyata dari PT. Telkom Kancatel Lumajang.
- c. Menyerahkan surat izin Praktek Kerja Nyata dari PT. Telkom Kancatel Lumajang kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, untuk mendapatkan surat tugas Praktek Kerja Nyata.
- d. Menyerahkan surat tugas Praktek Kerja Nyata kepada PT. Telkom Kancatel Lumajang dengan diantar dosen supervisor dari Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan mulai tanggal 5 Maret 2003 sampai dengan tanggal 28 Maret 2003. PT.Telkom Kancatel Lumajang menetapkan 5 hari kerja efektif yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at. Adapun jam kerja yang diberlakukan pada PT.Telkom Kancatel Lumajang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jam Kerja PT.Telkom Kancatel Lumajang

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin– Kamis	07.30 – 17.00 BBWI	12.00 – 13.00 BBWI
Jum'at	07.30 – 17.00 BBWI	11.30 – 13.00 BBWI
Sabtu – Minggu	Kalau ada lembur	

Sumber: PT. Telkom Kancatel Lumajang

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT. Telkom Kancatel Lumajang, mahasiswa diharuskan membuat dan mengisi Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata (PKN) seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu	Keterangan
Minggu I	<ol style="list-style-type: none"> Menyerahkan surat tugas Praktek Kerja Nyata (PKN). Ditempatkan di bagian Support Perkenalan Mempelajari gambaran umum perusahaan (PT.Telkom).
Minggu II	<ol style="list-style-type: none"> Menerima penjelasan tentang pelaksanaan PPh Pasal 21 pada kantor PT. Telkom Kancatel Lumajang. Mempelajari cara perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Telkom Kancatel Lumajang.
Minggu III	<ol style="list-style-type: none"> Memperoleh data tentang pengenaan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap PT. Telkom Kancatel Lumajang. Memperoleh struktur organisasi PT. Telkom Kancatel Lumajang. Memperoleh data pembagian tugas pegawai PT. Telkom Kancatel Lumajang.

Minggu IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan. b. Mencatat hal-hal yang penting dalam penyusunan laporan. c. Meminta penjelasan kembali tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan laporan. d. Memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari hasil Praktek Kerja Nyata. e. Meminta surat keterangan selesai PKN (Praktek Kerja Nyata). f. Perpisahan.
-----------	---

3.2. Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)

3.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Kep-545/PJ/2000 Pasal 1. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak atas Penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

3.2.2 PPh Pasal 21 dikenakan Pada Pegawai Tetap PT. Telkom Kancatel Lumajang.

a. Penghasilan bersifat tetap.

Merupakan Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak setiap bulan secara teratur. Penghasilan tersebut tidak termasuk dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh PT. Telkom kepada setiap pegawainya sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Jadi penghasilan tersebut di atas merupakan gaji dasar yang diterima pegawai setiap bulan tidak termasuk dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan.

b. Kompensasi lain tidak terhitung gaji pegawai:

1) Tunjangan Kongjungtur.

Merupakan tunjangan yang diberikan oleh PT.Telkom untuk kesejahteraan pegawainya. Besarnya tunjangan tersebut disesuaikan dengan keadaan perekonomian daerah.

2) Tunjangan Prestasi.

Merupakan tunjangan yang diberikan oleh PT.Telkom sesuai dengan prestasi masing-masing pegawai.

3) Tunjangan Pajak Umum.

Merupakan tunjangan yang diberikan oleh PT.Telkom untuk pembayaran Pajak Umum.

4) Tunjangan Posisi.

Merupakan tunjangan yang diberikan oleh PT.Telkom yang disesuaikan dengan posisi masing-masing pegawai di lihat dari unit kerja masing-masing.

5) Tunjangan Jamsostek.

Merupakan tunjangan yang diberikan oleh PT.Telkom untuk Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja masing-masing pegawai.

3.2.3 Tarif PPh Pasal 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) dari Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 antara lain:

- a. Tarif 5% yang ditetapkan untuk penghasilan yang jumlahnya sampai dengan Rp. 25.000.000,00.
- b. Tarif 10% yang ditetapkan untuk penghasilan yang jumlahnya di atas Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00.
- c. Tarif 15% yang ditetapkan untuk penghasilan yang jumlahnya di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00.
- d. Tarif 25% yang ditetapkan untuk penghasilan yang jumlahnya di atas Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00.
- e. Tarif 35% yang ditetapkan untuk penghasilan yang jumlahnya di atas Rp. 200.000.000,00.

3.2.4 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) atas pegawai tetap PT. Telkom Kancatel Lumajang.

Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Telkom Kancatel Lumajang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Cara-cara tersebut diuraikan seperti di bawah ini:

- a. Menghitung gaji yang diperoleh ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang selama satu bulan.
- b. Mengurangi besarnya penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan sebesar 5 %, beserta iuran-iuran dari penghasilan tiap bulan.
- c. Baru dapat diketahui besarnya Penghasilan Netto. Penghasilan Netto tersebut yang sudah disetahunkan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat ini.
- d. Setelah Penghasilan Kena Pajak (PKP) diketahui baru dapat dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan tarif yang berlaku saat ini (UU Nomor 17 Tahun 2000).
- e. Setelah Pajak Penghasilan Pasal 21 selama satu tahun diketahui baru dapat ditetapkan Pajak Penghasilan Pasal 21 selama satu bulan.
- f. Setelah itu Wajib Pajak (PT.Telkom Kancatel Lumajang) wajib melakukan pembayaran melalui Kantor Pos yang telah mendapat ijin dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak).
- g. PT.Telkom Kancatel Lumajang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT masa) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Probolinggo paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tersebut diuraikan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3. Rincian Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP)

No	Status	Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		KET
		Setahun	Sebulan	
1.	Tidak Kawin (TK)	Rp. 2.880.000,00	Rp. 240.000,00	
2.	Kawin (K / -)	Rp. 4.320.000,00	Rp. 360.000,00	
3.	Kawin Anak Satu (K/1)	Rp. 5.760.000,00	Rp. 480.000,00	
4.	Kawin Anak Dua (K/2)	Rp. 7.200.000,00	Rp. 600.000,00	
5.	Kawin Anak Tiga (K/3)	Rp. 8.640.000,00	Rp. 720.000,00	
6.	Tidak Kawin Anak satu (TK/1)	Rp. 4.320.000,00	Rp. 360.000,00	
7.	Kawin Istri Kerja (K/I/-)	Rp. 5.760.000,00	Rp. 480.000,00	
8.	Kawin Istri Kerja Anak satu (K/I/1)	Rp. 7.200.000,00	Rp. 600.000,00	
9.	Kawin Istri Kerja Anak Dua (K/I/2)	Rp. 8.640.000,00	Rp. 720.000,00	
10.	Kawin Istri Kerja Anak Tiga (K/I/3)	Rp. 10.080.000,00	Rp. 840.000,00	

Sumber: KEP-545/PJ/2000

3.2.4 Perhitungan 1.

Nama Pegawai : SUPARDI
 NIK : 530581
 B. Ind./B.pos/Status : VI.2 / VI.2 / Pegawai Tetap Aktif
 Lokasi Kerja : Unit Support Lumajang
 Jalur Karir/Jabatan : Spe / Officer 3 Logistik & Asset

- a. Gaji dasar Rp. 721.000,00
- 1) Tunjangan :
 - 2) Tunjangan Konjungtur Rp. 985.500,00
 - 3) Tunjangan Prestasi Rp. 461.510,00
 - 4) Tunjangan Pajak Umum Rp. 76.308,00
 - 5) Tunjangan Posisi Rp. 425.000,00

3.6.2 Perhitungan 2.

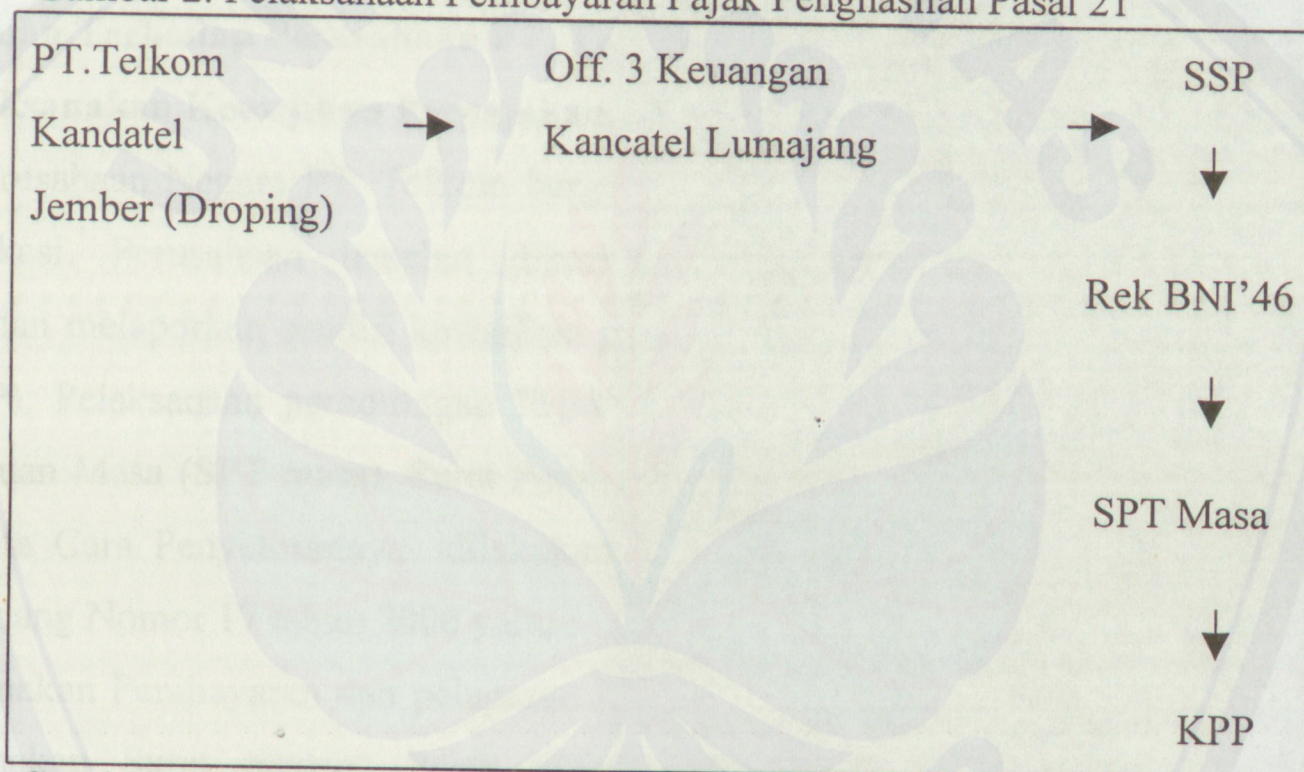
Nama Pegawai : S U N A R T O
 NIK : 631180
 B.Ind/B.Pos/Status : VII.5 /VII.5 / Pegawai Tetap Aktif
 Lokasi Kerja : UNIT SUPPORT LMJ JR
 Jalur Karir/Jabatan : STAF/PELAKSANA

a. Gaji dasar		Rp. 477.000,00
. Tunjangan :		
1) Tunjangan Konjungtur	Rp. 876.000,00	
2) Tunjangan Prestasi	Rp. 273.263,00	
3) Tunjangan Pajak Umum	Rp. 14.675,00	
4) Tunjangan Posisi	Rp. 280.000,00	
5) Tunjangan Jamsostek	Rp. 31.196,00	
	————— +	Rp. 1.475.134,00
		————— +
Bruto sebulan		Rp. 1.952.134,00
b. Pengurangan :		
1) B.Jabatan		
(5% X Rp. 1.952.134,00)	Rp. 97.600,00	
Potongan :		
1) Dana Kematian	Rp. 1.000,00	
2) TASPEN	Rp. 15.503,00	
3) Iuran Dana Pensiun	Rp. 40.068,00	
4) PPh Umum	Rp. 14.675,00	
5) Tabungan Wajib untuk Perumahan	Rp. 5.000,00	
6) Infaq & sedekah	Rp. 3.000,00	
7) Pembayaran Jamsostek	Rp. 31.196,00	
	————— +	
		Rp. 208.042,00
		————— -

	Rp. 1.744.092,00
Penghasilan Netto se-tahun	<u>Rp. 20.929.104,00</u>
PTKP se-tahun (K/2)	Rp. 7.200.000,00
c. PKP	Rp. 13.729.104,00
d. PPh Pasal 21 se- tahun (5 % X Rp. 13.729.104,00)	Rp. 686.455,00
PPh Pasal 21 sebulan (1/12 x Rp. 686.455,00)	Rp. 57.204,00

3.2.7 Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT. Telkom Kancatel Lumajang.

Gambar 2. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21



Sumber: PT. Telkom Kancatel Lumajang.

a. Keterangan Gambar:

- 1) Dalam melaksanakan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Telkom Kancatel Lumajang pertama-tama mendapatkan kiriman data tentang pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) juga mendapatkan pemasukan (dropping) dana dari Kancatel Jember.
- 2) Data beserta dropping dana tersebut diterima oleh bagian Officer 3 Keuangan PT. Telkom Kancatel Lumajang.

- 3) Bagian Keuangan tersebut mulai mengisi SSP (Surat Setoran Pajak) sesuai dengan data yang ada.
- 4) Setelah Surat Setoran Pajak (SSP) terisi dengan benar maka pihak Officer 3 Keuangan membayar/menyetorkan pajak ke KKP (Kepala Kantor Pos) melalui Rekening BNI'46. Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikut, setelah masa pajak berakhir.
- 5) Pengisian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dilakukan setelah Surat Setoran Pajak (SSP).
- 6) Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pajak Penghasilan Pasal 21 dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Probolinggo paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

3.3 Penilaian Terhadap Perusahaan PT. Telkom Kancatel Lumajang Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.

Perusahaan Negara PT. Telkom bergerak di bidang jasa khususnya jasa telekomunikasi. Perusahaan tersebut diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 baik Surat Pemberitahuan Masa (SPT masa), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) maupun Tata Cara Penyetorannya dilakukan sesuai dengan rumus tarif Pajak Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 yaitu :

- a. Melaksanakan Pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) melalui BNI'46. Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikut setelah masa pajak berakhir. Jika terlambat dikenakan denda/bunga sebesar 2 %.
- b. Sebagai pelaksana wajib pungut wajib melaporkan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 (SPT Masa PPh 21) paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila terlambat maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,00.

- c. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) dipungut pada pegawai tetap tiap tahun dapat mengalami perubahan karena faktor mutasi, kenaikan gaji secara berkala, dan habis masa jabatannya.

Dari data di atas PT. Telkom Kancatel Lumajang telah melaksanakan kewajiban meliputi perhitungan, pembayaran, pelaporan secara rutin, dan tidak pernah terlambat. Pelaksanaan kewajiban dalam membayar pajak tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku saat ini. PT. Telkom Kancatel Lumajang tidak pernah dikenakan denda karena PT. Telkom Kancatel Lumajang merupakan Wajib Pajak yang taat.

3.3 Uji Pengalaman Praktis yang diperoleh Penulis selama Praktek Kerja Nyata(PKN) di PT.Telkom Kancatel Lumajang.

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT.Telkom Kancatel Lumajang Penulis mendapatkan Uji Pengalaman Praktis antara lain:

- a. Penulis dapat lebih mengerti tentang cara-cara pengisian SPT Masa dan SPT Tahunan.
- b. Penulis dapat mengetahui cara kerja PT.Telkom Kancatel Lumajang.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.

Dalam penyusunan Laporan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN), tahap akhir yang dapat disampaikan penulis adalah menarik kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan di muka. Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan pada PT. Telkom Kancatel Lumajang khususnya dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT. Telkom Kancatel Lumajang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak, sehingga mulai dari proses pembayaran, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

4.2 Saran.

Sebagai akhir dari penulisan Laporan ini. Penulis mempunyai saran yang merupakan bahan masukan bagi Kantor Penyuluhan Pajak (KPP) agar menambah petugas pemeriksaan lapangan dan membagi daerah wilayah yang akan diperiksa sehingga akan mempermudah pelaksanaan pemeriksaan pajak. Begitu juga untuk PT. Telkom Kancatel Lumajang penulis mempunyai saran/bahan masukan yaitu diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang PT. Telkom Kancatel Lumajang lebih memperhatikan pada sektor-sektor perpajakan, khususnya dalam pelaksanaan pembayaran pajak.

Penulis menyadari bahwa Laporan yang dikemukakan di muka masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh penulis. Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya jika selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau saat menyusun Laporan ini ada kesalahan/hal yang tidak berkenan. Akhirnya semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jendral Pajak. 2002. *Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta.

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No 545/KMK.04/2000. *Petunjuk Pelaksanaan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.

Mardiasmo. 2001. *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.

PT. Telkom. (Tanpa tahun). *Gambaran Umum Perusahaan*. Jakarta.

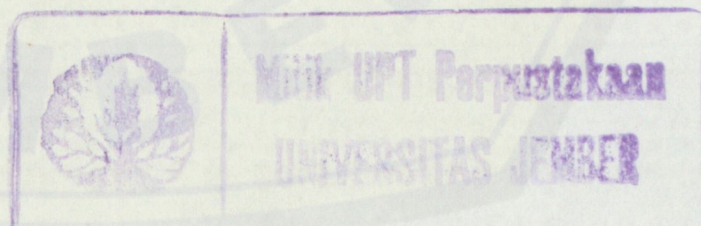
PT. Telkom. 2002. *Panduan Telekomunikasi Jawa Timur*. Jakarta.

Waluyo. Wiranto. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widya Prakosa, S, dkk. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat diterima PKN (Praktek Kerja Nyata)
- Lampiran 2 Surat tugas.
- Lampiran 3 Surat Keterangan selesai PKN (Praktek Kerja Nyata)
- Lampiran 4 Daftar hadir siswa PKN (Praktek Kerja Nyata)
- Lampiran 5 Surat Setoran Pajak lembar ke-1
- Lampiran 6 Surat Setoran Pajak lembar ke-5
- Lampiran 7 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26
- Lampiran 8 Slip gaji karyawan PT. Telkom Kancatel Lumajang ke-1
- Lampiran 9 Slip gaji karyawan PT. Telkom Kancatel Lumajang ke-2
- Lampiran 10 Bukti Penerimaan Surat Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26
- Lampiran 11 SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Pasal 21



Lampiran 1

Nomor : C.Tel. 32./UM000/RE5-D04/LUM-01/2003

Lumajang, 06 Pebruari 2003

Kepada : Yth Pembantu Dekan I FISIP
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
Jl. Kalimantan – Kampus Tegal Boto Jember

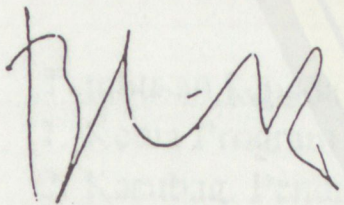
Perihal : Magang

Menunjuk surat Saudara nomor 0462/J25.1.2 tanggal 03 Pebruari 2003 perihal Permohonan tempat magang, , kami bersedia menerima mahasiswa Saudara untuk melaksanakan magang dibidang keuangan / perpajakan unit Support KANCATEL LUMAJANG.

Mahasiswa dimaksud atas nama : AMRETHA ANDHANA WARIH / NIM. 20 - 1105
dan DWI SETIANINGSIH / NIM 20 - 1121.

Magang akan dilaksanakan mulai tanggal ^{05 Maret} ~~01 April~~ 2003 sampai dengan ^{28 Maret} ~~30 April~~ 2003. Sebelum melaksanakan praktek kerja nyata agar menandatangani Surat Pernyataan Praktek Kerja Nyata yang telah disediakan di perusahaan kami.

Demikian harap maklum atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



BHIMO ARYANTO
POH. MANAGER

Committed 2 U

SURAT - TUGAS

No 0752/125.1.2/PP/9/2003


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Amreta Andhana W.	20 - 1105
2.	Dwi Setianingsih	20 - 1121

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. TELKOM di
Lumajang, selama 30 hari terhitung sejak 5 Maret 2003 s.d tanggal 28
Maret 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang
berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Februari 2003

Dekan

 Moch. Toerki
 NIP. 130524812

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

SURAT KETERANGAN

NOMOR : C.TEL 105/PS000/RE5/DO4/LUM-01/2003

Dengan ini kami Manager Kantor Cabang Telekomunikasi Lumajang menerangkan bahwa :

NAMA : AMRETA ANDHANA WARIH

NIM : 000903101105

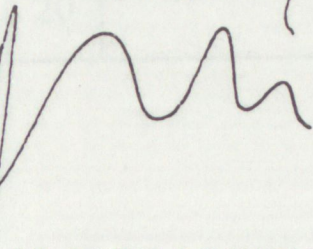
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI : D III PERPAJAKAN

Telah selesai melaksanakan PKN (PRAKTEK KERJA NYATA) di Kancatel Lumajang mulai tanggal 05 MARET 2003 Sampai dengan 28 MARET 2003, dengan hasil **BAIK**.

Demikian surat keterangan ini untuk diketahui seperlunya.

Lumajang , 28 Maret 2003



M.AMIR YUNUS
MANAGER KANCATEL LUMAJANG

Committed 2 U

DAFTAR HADIR KEGIATAN MAGANG DI PT. TELKOM LUMAJANG

NAMA : AMRETA ANDHANA WARIH

FAK/JUR : ISIP/DIII PERPAJAKAN

NIM : 20-1105

N O	HARI/TANGGAL	JAM MASUK	JAM PULANG	TTD
1	Rabu, 5 Maret 2003	07.30	17.00	/
2	Kamis, 6 Maret 2003	07.30	17.00	/
3	Jumat, 7 Maret 2003	07.30	17.00	/
4	Senin, 10 Maret 2003	07.30	17.00	/
5	Selasa, 11 Maret 2003	07.30	17.00	/
6	Rabu, 12 Maret 2003	07.30	17.00	/
7	Kamis, 13 Maret 2003	07.30	17.00	/
8	Jumat, 14 Maret 2003	07.30	17.00	/
9	Senin, 17 Maret 2003	07.30	17.00	/
10	Selasa, 18 Maret 2003	07.30	17.00	/
11	Rabu, 19 Maret 2003	07.30	17.00	/
12	Kamis, 20 Maret 2003	07.30	17.00	/
13	Jumat, 21 Maret 2003	07.30	17.00	/
14	Senin, 24 Maret 2003	07.30	17.00	/
15	Selasa, 25 Maret 2003	07.30	17.00	/
16	Rabu, 26 Maret 2003	07.30	17.00	/
17	Kamis, 27 Maret 2003	07.30	17.00	/
18	Jumat, 28 Maret 2003	07.30	17.00	/
19				
20				

LUMAJANG, 28 Maret 2003

(PENANGGUNG JAWAB)

SS. SUPERVISOR

TRICAHYONO

NIK. 610159

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PROBOLINGGO

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

Untuk Arsip WP

: 01 - 000 013 - 1 - 625 - 002 *Diisi sesuai NPWP*

WP : PT TELKOM.IND.LUMAJANG

WP : JL. S.PARMAN NO.16

LUMAJANG

Kode Pos

Jenis Pajak (MAP) Kode Jenis Setoran

1 1 1

1 0 0

Unit Pembayaran *)

SETOR PPH.21 GAJI /JULI 2002

Daftar pada halaman belakang lembar 1

Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

silang pada kolom yang berkenaan

Peb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sep Okt Nov Des

silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP,SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

2 0 0 2

Ketetapan : / / / /

Nomor ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Pembayaran
in pembayaran rupiah, penuh

5.583.994,-

Terbilang : *Lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*
Diisi dengan huruf

Bank Persepsi/Kantor Pos



TANDA TERIMA SETORAN GIROPOS ASLI

No. 8/46 Besar uang Rp. 5.583.994,-
dengan huruf: *Lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat*

GIR 6

pada rekening No.

atas nama

Disetor oleh : *Zainal Arifin*

Bea setor Rp.



PT. TELKOM INDONESIA LUMAJANG

Nama Jelas : ZAINAL ARIFIN
SS. SUPPORT

oleh Bank Persepsi tanggal

Cap dan tanda tangan

klas .

raian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

han Informasi :

husus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi objek
husus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi objek



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

Surat ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri

untuk masa bulan JULI tahun 2002 adalah

sebesar Rp.5,583,994.00

LIMA JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU SEMBILAN RATUS SEMPULAN

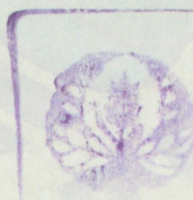
dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

PPh. Pasal 21 dan PPh. Pasal 26 yang telah dipotong :

Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto
1	2	3
Pegawai tetap / Gaji	61	149,953,169
Gaji insentif	.	.
Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	.	.
Pesunahan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	.	.
Pegawai Harian / Mingguan	.	.
Pegawai satuan	.	.
Pegawai Borongan	.	.
Pegawai Honorer	.	.
Pegawai Honorarium	.	.
Penarikan iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	.	.
Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar negeri	.	.
Penerimaan Imbalan Jasa (Orang Pribadi)	.	.
J U M L A H		Rp.149,953,169.00

Diperhitungkan kelebihan setor tahun sebelumnya

PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun sebelumnya yang belum diperhitungkan



Unit Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

3. PPh. Pasal 21 yang dipotong final :

Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh Yang dipotong (Tarif X Penghasilan Bruto)
1	2	3	4
1. Penerimaan Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan lomba.	0	Rp.0	Rp.0.00
2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Penjaja Barang yang menerima komisi			
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara Daerah	2	Rp.0	Rp.0.00
J U M L A H		Rp.0	Rp.0.00

C. LAMPIRAN :

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 26)
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan / atau Pasal 26 sebanyak(.....) lembar

D. Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KKP

Diterima tanggal,

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

NIP.

PROBOLINGGO , 19 AGUSTUS 2002

Pemotong Pajak

N a m a : PT. TELKOM LUMAJANG

N P W P : 01.000.013.1.625.002

A l a m a t : JL.S.PARMAN NO.16
LUMAJANG

WAJIB PAJAK /PENYETOR

Tricahyono
TRICAHYONO

NIK.610159

SLIP GAJI KARYAWAN

Juli 2002

NIK: 530581
 Nama Pegawai: SUPARDI
 Ind./B.Pos/Status: VI. 2 / VI. 2 / Pegawai Tetap Aktif
 Lokasi Kerja: UNIT SUPPORT LMJ JR
 Jalur Karir/Jabatan: SPE / OFFICER 3 SUPPORT

Jenis Gaji: Reguler
 Tanggal Gaji: 01 Juli 2002
 % NKU: 121.45 %
 Sta. Kel.: K / 3
 Jenis Kelamin: Pria

PERINCIAN GAJI

Jumlah Penghasilan	Jumlah Potongan	Gaji Bersih	Terbilang
2.716.471	216.458	2.500.013	Dua Juta Lima Ratus Ribu Tiga Delas Rupiah

Penghasilan	Rp.	Rapel	Potongan	Rp.	Rapel
Gaji Dasar	721.000		Dana Kematian	1.000	
Penjangan Konjungtur	985.000		TASPEN	23.433	
Penjangan Prestasi	101.510		Iuran Dana Pensiun	60.564	
Penjangan Pajak Umum	76.308		PPH Umum	76.303	
Penjangan Posisi	125.000		Tabungan Wajib Perumahan	5.000	
Penjangan Jamsostek	47.153		Infak & Sedekah	3.000	
			Pembayaran Jamsostek	47.153	

RINGKASAN PERHITUNGAN PAJAK

Penghasilan Umum	IDP & TASPEN	Pajak Penghasilan
s/d bulan lalu	s/d bulan lalu	s/d bulan lalu
30.323.054	578.193	1.665.708

SLIP GAJI KARYAWAN

Juli 2002

Pegawai **631180**
SUNARTO
 B.Pos/Status **VII. 5 / VII. 5 / Pegawai Tetap Aktif**
 Kerja **UNIT SUPPORT LMJ JR**
 Larir/Jabatan **STAF / PELAKSANA**

Jenis Gaji **Reguler**
 Tanggal Gaji **01 Juli 2002**
 % NKU **121.45 %**
 Sus. Kel. **K / 2**
 Jenis Kelamin **Pria**

PERINCIAN GAJI

Jumlah Penghasilan	Jumlah Potongan	Gaji Bersih	Terbilang
1,952,134	110,442	1,841,692	Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah

Penghasilan	Rp.	Rapel	Potongan	Rp.	Rapel
Dasar	477,000		Dana Kematian	1,000	
Gaji Konjungtur	876,000		TASPEN	15,503	
Gaji Prestasi	273,263		Tabungan Dana Pensiun	40,068	
Gaji Pajak Umum	14,675		PPH Umum	14,675	
Gaji Posisi	280,000		Tabungan Wajib Perumahan	5,000	
Gaji Jamsostek	31,196		Infak & Sedekah	3,000	
			Pembayaran Jamsostek	31,196	

RINGKASAN PERHITUNGAN PAJAK

Penghasilan Umum s/d bulan lalu	IDP & TASPEN s/d bulan lalu	Pajak Penghasilan s/d bulan lalu
20,909,697	382,354	827,925

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-9494/WFJ.12/KP.0906/MSP21/2002
PENYAMPAIAN SPT NISA PPh PASAL 21/26

TELKOM INDONESIA
S. PARMAN NO.16
MAJANG

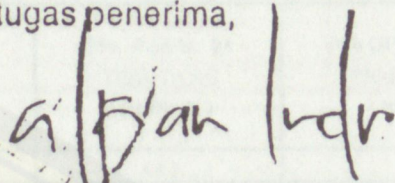
N.P.W.P : 01.000.013.1-625-00
No. P.K.P :
Ms/Thn pajak : JUL 2002

h Pasal 21 : Rp. 5,583,994,-

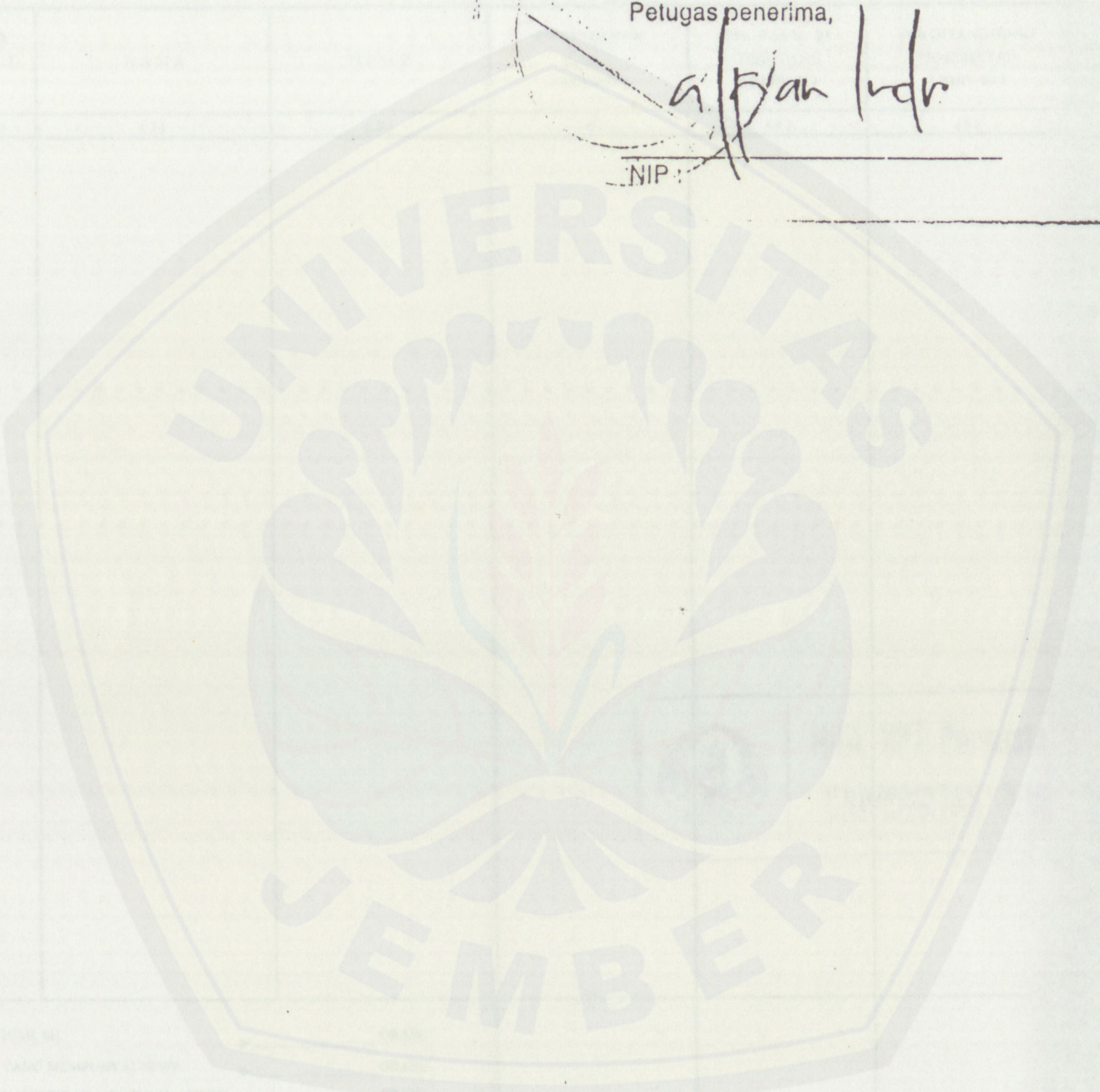
tanggal Masuk SPT : 20-08-2002

PROBOLINGGO, 20-08-2002

Petugas penerima,



NIP :



6

